Edisi Tahun Ke-2, Agustus 2009

Ekono-mix Syariah

• Muamalah • Barokah & Dakwah

Luluk Mahfudah

Optimalkan Kemitraan *Antar Bank Syariah*

Tantangan Nakhoda Baru Bank Muamalat

Penyaluran KUR Berjalan Mundur Akibat Krisis Ekonomi Global

Farouk Abdullah Alwyni

Sindikasi Internasional **Peluang Baru Bank Muamalat**

BNI Syariah **Siap Dukung BWI**

Tantangan Nakhoda Baru Bank Muamalat

Pertumbuhan bisnis bank Muamalat selama ini mencapai Rp.14,8 trilliun pada Juni 2009 tak lepas dari kepemimpinan para awak direksi yang selama ini menakhodai bank syariah yang memiliki moto bank pertama dan murni syariah tersebut.

Semenjak Ahmad Riawan yang merupakan mantan Direktur Utama Bank Muamalat—pergerakan bisnis Bank Mumalat terus maju pesat seperti jaringan bisnis di berbagai daerah nyaris layanan Shar-E bisa ditemui di berbagai kantor pos di seluruh Indonesia dan penarikan tabungan Shar-E bisa dilakukan di ATM BCA dan ATM Bersama. Maka tak heran jika banyak kalangan menilai Bank Muamalat sebagai bank syariah yang memiliki jaringan terbesar di Indonesia.

Amanat sebagai bank syariah terbesar dari sisi jaringan itulah yang kini menjadi tantangan tersendiri bagi nakhoda baru pengganti *"The Dream Team"* eranya A. Riawan Amin. Ditengah munculnya Bank Umum Syariah baru seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mega Syariah (BMS), Bank Bukopin Syariah dan BRI Syariah; Bank Muamalat dibawah nakhoda baru Arviyan Arifin sebagai Direktur Utama beserta para direksinya seperti Andi Buchari, M Hidayat, Farouk Abdullah Alwyni, Luluk Mahfudah dan Adrian Asharyanto Gunadi kini dituntut untuk mempertahankan bisnis Bank Muamalat yang memiliki tingkat bagi hasil yang sangat kompetitif.

Arviyan Arifin

Andi Buchari salah satu Direksi Bank Muamalat saat jumpa pers dengan para wartawan di Hotel Sangrila Jakarta beberapa waktu yang lalu mengatakan, ditengah majunya bisnis Bank Muamalat yang ada selama ini dirinya bersama dengan para direksi harus mampu mempertahankan. Apalagi pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 32,5% dari Rp. 9,34 triliun pada Juni 2008 menjadi Rp. 12,38 triliun pada Juni 2009 ini. Pertumbuhan tersebut juga dialami oleh pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 15,8% dari Rp. 9,61 trilliun pada Juni 2008 menjadi Rp.11,13 trilliun di Juni 2009 ini.

"Amanah bisnis itulah yang *Insya Allah* akan kami teruskembangkan", paparnya.

Ditengah besarnya aset bisnis serta kencangnya menyalurkan pembiayaan, banyak investor luar negeri khususnya dari Timur Tengah melirik Bank Muamalat. Hal ini yang mendorong Bank Muamalat untuk mendirikan dua anak perusahaan, terdiri dari perusahaan *leasing* dengan nama PT. Al-Ijarah Islamic Finance (ALIF) dan perusahaan management investasi di Malaysia dengan nama First Islamic Investment Bank Ltd. dengan modal awal 10 juta dolar AS di Malaysia.

PT. Alif selama ini telah melakukan *leasing* serta melakukan sindikasi-sindikasi pembiayaan berbagai proyek pembangunan dan infrastruktur di Indonesia. Dengan adanya PT. Alif, Bank Muamalat -- yang selama ini dikenal dalam menyalurkan pembiayaan dalam bentuk ritail -- dimana 70 persen untuk pelaku bisnis yang tergabung dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa lebih luas lagi dan berbagai proyek besar dalam sekala luas bisa dibiayai.

"Dengan demikian Bank Muamalat juga memiliki segmentasi yang lebih besar terlibat dalam

pembangunan perekonomian nasional", tandas Herbudi S. Utomo yang merupakan Direktur Utama PT. Alif.

Sedangkan dengan hadirnya First Islamic Investment Bank Ltd, kata Andi Buchari yang selama ini dipercaya mengelola perusahaan tersebut di Malaysia mengatakan, didirikannya perusahaan tersebut untuk membidik investor internasional, terutama investor Timur Tengah dan Afrika bagian Utara (Northern Africa/MENA).

Ia mengatakan, pendirian investment bank tersebut untuk menarik dana dari investor yang menanamkan modalnya di pembiayaan modal *(equity financing)* berjangka waktu menengah dan panjang, 5-10 tahun. Dana tersebut akan diinvestasikan untuk penyertaan modal pada proyek *(private equity fund)* dan investasi langsung *(direct investment).*

"Jadi nantinya proyek-proyek yang dibiayai adalah proyek infrastruktur di Indonesia dengan jangka waktu lebih lama daripada investasi di pasar modal", tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga berbisnis dalam pembiayaan melalui surat utang (debt financing) dan menjadi penasehat keuangan (financial advisory).

Untuk bisa beroperasi dan menjadi salah satu lembaga keuangan syariah internasional, First Islamic Investment Bank Ltd. telah mendapatkan ijin dari LOFSA (Labuan Offshore Financial Services Authority) di Malaysia dan telah mendapatkan *letter of content* dari Bank Indonesia. Dengan kedua ijin tersebut, First Islamic Investment Bank Ltd. telah siap untuk mengelola dana investasi dari pelaku bisnis internasional yang selama ini di parkirkan di Malaysia dan Singapura.

Sedangkan Arviyan Arifin—saat peluncuran produk Muamalat *Mobile Banking*, menambahkan selain inovasi produk yang selama ini dimiliki, kedepan Bank Muamalat akan meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan melalui *Muamalat Mobile Banking* merupakan upaya bagi bank Muamalat dalam memanjakan para nasabahnya.

Muamalat Mobile Banking adalah fasilitas perbankan dari Bank Muamalat Indonesia yang memanfaatkan teknologi seluler berbasis GPRS. Dengan *Muamalat Mobile Banking*, nasabah bisa melakukan cek saldo, transfer antar rekening Muamalat, histori transaksi terakhir dan Info kurs dan info produk.

"Dengan adanya *Muamalat Mobile Banking*—melalui segenggam *handphone selluler* nasabah bisa melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana tempat mereka berada", ucapnya.

Hadirnya *Muamalat Mobile Banking*, kata Arviyan Arifin merupakan awal kepemimpinannya untuk menjadikan Bank Muamalat sebagai bank syariah modern. Dia melakukan semua itu berlandaskan dinamika perkembangan masyarakat saat ini

Foto : Repro

yang sudah banyak bersentuhan dengan teknologi modern seperti handphone dan Internet. "Sedangkan bank syariah harus mampu terus menerus meresponya dan membuat inovasi-inovasi baru", paparnya.

BI Menyambut Baik

Hadirnya bank syariah yang telah memanfaatkan teknologi modern disambut positif oleh Bank Indonesia. Melalui Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman D. Hadad, berharap agar bank syariah memanfaatkan perkembangan teknologi IT yang ada selama ini. Dia mengatakan bahwa selama ini teknologi IT yang dimiliki oleh bank syariah masih kalah jauh dengan yang dimiliki oleh bank konvensional. "Jika ada bank syariah mampu memanfaatkan teknologi IT—maka perkembangan bank syariah di Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata", kata Muliaman yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Terkait dengan hadirnya bank-bank syariah mampu memanfaatkan teknologi IT sebagai pengembangan produk, seperti Bank Muamalat dia menyambut baik. Muliaman menambahkan dengan banyaknya akad-akad syariah dalam transaksi perbankan syariah, inovasi produk perbankan syariah terus berkembang pesat.

"Dengan demikian bank syariah akan lebih kompetitif", paparnya.

Untuk mempertegas peryataan Muliaman, Luluk Mahfudah yang merupakan Direksi Bank Muamalat mengungkapkan selain melakukan inovasi produk Bank Muamalat juga menjalin kerjasama dengan antar perbankan syariah. Menurutnya munculnya bank-bank syariah bukan merupakan kompetitor tapi adalah mitra. Melalui kerjasama-kerjasama bisnis, Luluk meyakini bank syariah di Indonesia bisa melakukan sinergi dalam mengembangkan pembiayaan seperti sindikasi berbagai proyek nasional.

"Saya rasa hal ini harus dilakukan oleh bank syariah secara bersama-sama", ujarnya.

Sebelumnya Bank Muamalat bersama dengan bank-bank syariah lain mempelopori sistem interkoneksi layanan bersama dengan nama *Sharia Deposit Arrangement (SHADR)*. Dengan SHADR masyarakat yang memiliki tabungan di bank syariah dengan mudah melakukan transaksi perbankan di bank syariah manapun.

Namun dalam perkembangannya, program SHADR yang spektakuler tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh pelaku perbankan syariah yang lain. Hanya beberapa bank syariah saja yang terlibat dengan layanan SHADR. Sehingga dengan demikian konsep SHADR belum mampu membumi.

Menanggapi hal tersebut, Luluk mengatakan akan mengkoreksi kembali sistem tersebut dan dia merasa sosialisasi dari SHADR itu masih terasa kurang bagi bank-bank syariah. "Padahal sistem SHADR memberikan arti penting bagi integritas bank syariah di Indonesia. Insya Allah para nakhoda baru di Bank Muamalat akan mencoba mengembangkan kembali sistem layanan SHADR yang bisa dimanfaatkan oleh semua perbankan syariah", terangnya.• *Agus Y.*

Farouk Abdullah Alwyni
Direktur Internasional operasional Banking BMI

Sindikasi Internasional Peluang Baru Bank Muamalat

Meski disebut sebagai orang baru dalam jajaran direksi baru Bank Muamalat-- Farouk Abdullah Alwyni sebetulnya adalah orang lama di Bank Muamalat, sebab sebelumnya ia sudah menjadi direktur di PT. Al-Ijarah Islamic Finance (ALIF) yang merupakan anak perusahaan pertama Bank Muamalat.

Dalam tubuh kepemimpinan Arviyan Arifin sebagai nakhoda baru Bank Muamalat posisinya tak berubah seperti saat di PT. Alif, yaitu bertanggung jawab untuk Hubungan Internasional. Pos sebagai Direksi Internasional Operasional Banking sangat tepat untuk ia sandang sebab selama delapan tahun dia bekerja di lembaga internasional, Islamic Development Bank (IDB), yang merupakan lembaga Islam internasional yang bermarkas di Jeddah yang diikuti oleh 56 negara.

Sebagai salah satu direksi Bank Muamalat, Farouk akan mengembangkan Bank Muamalat dalam sindikasi-sindikasi pembiayaan internasional yang belum dimanfaatkan penuh oleh pelaku perbankan syariah di Indonesia.

"Apalagi hingga kini banyak dana-dana dari Timur Tengah menganggur dan butuh tempat investasi, kami ingin di Bank Muamalat-lah sebagai tempat mereka untuk menanamkan investasinya", ujar Farouk.

Peluang memanfaatkan dana tersebut menurut Farouk tidak sulit apalagi Indonesia memiliki potensi sektor riil yang sangat melimpah dan untuk mewujudkan itu diperlukan sinergi dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Selama pemerintah dan masyarakat punya komitmen dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah, Farouk meyakini bank syariah di Indonesia akan maju dengan pesat. Dia yakin pula bahwa kedepan Bank Muamalat sebagai pintu masuknya kepercayaan para investor luar negeri dalam mengembangkan bisnis berbasis syariah. •*Agus Y.*

Luluk Mahfudah
Direksi Consumer Banking

Optimalkan Kemitraan Antar Bank Syariah

Sama dengan Farouk Abdullah Alwyni yang merupakan Direksi baru bank Muamalat, sosok kehadiran Luluk Mahfudah dalam jajaran para direksi merupakan sesuatu yang baru. Setelah sekian lama kursi direksi Bank Muamalat tanpa pernah dipimpin oleh seorang wanita, kini Luluk Mahfudah merupakan wanita pertama di Bank Muamalat yang menjabat sebagai Direksi Consumer Banking yang merupakan spesialisasi kerjanya selama ini.

Saat terpilih menjadi Direksi—ia menolak disebut sebagai muka baru di Bank Muamalat sebab sebelum menjadi direksi Bank Muamalat dia sudah bekerja sejak berdirinya Bank Muamalat.

"Jadi saya ini adalah orang lama atau stok lama di Bank Muamalat, maka jangan melihat saya adalah orang baru di Bank Muamalat", celetuknya.

Posisi sebagai Direksi Consumer Banking di Bank Muamalat merupakan tantangan tersendiri bagi dirinya. Jika dirunut ke belakang, wanita ini telah berkiprah sebagai banker syariah telah lama pula. Sejak tahun 1999, setelah lulus program ODP (Officer Development Program) angkatan kedua yang diadakan oleh Bank Muamalat Indonesia tahun 1993-1999, ia ditugaskan sebagai *Junior Account Manager*, kemudian pada tahun 1999-2000 sebagai Pimpinan Deputi Bidang Pembiayaan. Pada tahun 2001, Ia menjabat sebagai Pimpinan kantor cabang pembantu di Slipi. Kemudian pada tahun 2002-2006, dipindahkan sebagai Pimpinan cabang Fatmawati. Akhirnya tahun 2007, Luluk diangkat menjadi pimpinan bisnis di Kantor Cabang BMI Muamalat di Arthaloka, Jakarta Pusat.

Luluk menceritakan bahwa sejak dulu ia termasuk orang yang *introvert* (tertutup), namun memiliki keahlian dalam menganalisis. Ketika ia ditempatkan di posisi pemasaran, ia menjadi pribadi yang mudah bergaul dan senang bertemu banyak orang.

"Dalam memimpin, saya memiliki motto, hari ini harus lebih baik dari kemarin, serta melakukan hal yang bermanfaat bagi masyarakat", ungkap Ibu dari dua orang anak, Inas Rafidah (12 tahun) dan Mohammad Irsyad Rabbani.

Kemudian ketika ditanya apa yang akan dikembangkan olehnya ketika menjadi salah satu direksi di Bank Muamalat, dengan tegas ia menyatakan dalam kepemimpinannya ia akan menjalin kerjasama dengan bank-bank syariah di tanah air. Menurutnya kerjasama tersebut perlu dilakukan, dengan demikian bank syariah bisa terlibat dalam proyek-proyek pembangunan.

"Maka dari itu bank-bank syariah di Indonesia harus bersatu dan terus menjalin komunikasi", ungkapnya. •*Agus Y.*

Andi Buchari,
Direktur Bank Muamalat

"Insya Allah *Visi* Bank Muamalat Dipertahankan"

Salah satu misi didirikannya Bank Muamalat adalah untuk menjawab keinginan umat memiliki bank yang bebas riba. Bagaimana mempertahankan visi tersebut ? Ditengah kebijakan Bank Indonesia mendorong bank syariah untuk mengejar rasional market yang dianggap banyak memberikan keuntungan. Agus Yuliawan dari Ekono-Mix Syariah mewawancarai Andi Buchari yang merupakan salah satu Direktur Bank Muamalat. Berikut Petikannya:

Setelah terjadi perubahan komposisi dalam manajemen direksi Bank Muamalat, apa yang akan dikembangkan Bank Muamalat kedepan dalam mengembangkan industri syariah di Indonesia?

Kami akan terus mengembangkan apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh Bank Muamalat dan bagi kami sebagai direksi baru bagaimana menjalankan visi dan misi perusahaan yang sesuai dengan harapan dari masyarakat.

Salah satu misi didirikannya Bank Muamalat adalah untuk untuk menjawab keinginan umat memiliki bank yang bebas riba. Bagaimana mempertahankan visi tersebut?

Insya Allah kami akan mempertahankan visi tersebut, terlebih dari market Bank Muamalat yang ada selama ini adalah market loyalis. Itu artinya nasabah kami menyimpan dananya di Bank Muamalat tidak hanya sekedar melihat untung dan ruginya saja. Akan tetapi prinsip-prinsip syariah yang kami kembangkan selama ini yang membuat para nasabah mempercayai kami.

Anda yakin dengan segmentasi loyalis mampu berkembang?

Kami rasa bukan setuju dan tidak setuju berdasarkan pengalaman kami di Bank Muamalat—saat terjadi krisis keuangan baik tahun 1997 atau 2008 para nasabah di perbankan lain pada kabur sementara nasabah kami tetap eksis dan bertahan. Mengapa demikian? Sebab mereka melihat ada sesuatu nilai tersendiri di Bank Muamalat.

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun para peneliti yang lain menyebutkan segmentasi market loyalis bank syariah sangat kecil dibandingkan dengan market rasionalis. Nah, bagaimana Bank Muamalat menyeimbangkan?

Tentang hal tersebut kami memahaminya, dalam mengoperasikan bank syariah kami tidak bersifat konservatif yang hanya mengedepankan loyalis saja; tapi kami tetap berharap segmentasi rasional bisa menjadi bagian nasabah Bank Muamalat. Untuk menarik mereka agar bisa masuk, kami harus terus menerus memperbaiki kinerja kami sehingga mereka melihat kami berdasarkan profesionalisme, selain itu dari pelayanan terus kami kembangkan seperti Muamalat Mobile Banking yang merupakan integrasi bank syariah dengan teknologi IT. Dengan demikian orang memandang bahwa semua market bisa masuk di Bank Muamalat.

Adakah kedepannya ada perubahan branding jika Bank Muamalat merambah segala lini market?

Semua itu disesuaikan dengan keadaan. Tapi untuk saat ini kami tetap mempertahankan branding itu sebab dengan branding tersebut kami bisa survive selama ini.

Jika dilihat dari sisi bisnis kedepan, Bank Muamalat akan masuk sektor mana saja?

Kami memposisikan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kebetulan sektor tersebut lebih besar dari pada sektor lainya seperti korporasi dengan perbandingan 70% : 30%.

Mengapa dipilihnya sektor UMKM? Bukankah pihak perbankan lainnya sangat seret dalam menyalurkan pembiayaan bagi pelaku UMKM?

Misi kami di bank syariah berbeda dengan bank lainnya, kami hadir dituntut untuk mampu menggerakkan sektor riil di masyarakat. Jika kita lihat kedalam sektor riil yang mampu menggerakkan perekonomian di Indonesia adalah sektor UMKM. Jumlah pelaku UMKM itu sangat besar jumlahnya dan menyerap banyak tenaga kerja jika kami konsen di sektor tersebut secara otomatis kehadiran kami membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masayarakat.

Lantas bagaimana model penyalurannya?

Untuk penyaluran pada pelaku UMKM, kami melakukan linked dengan BPRS dan BMT. Saat ini kami telah mencanangkan 5000 BMT Shar-E yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui BMT itulah merupakan kemitraan kami untuk mendorong peningkatan sektor riil di masyarakat.

Bagaimana perkembangan kinerja bisnis secara umum di Bank Muamalat sekarang?

Pada tahun 2008 di saat krisis global melanda seluruh dunia, Bank Muamalat telah menunjukkan kinerja positif, bahkan hingga Juni tahun 2009 ini. Pertumbuhan Aset Bank Muamalat sendiri meningkat 31,9% dari Rp.11,2 Trilliun pada Juni 2008 menjadi Rp.14,8 Trilliun pada Juni 2009 ini. Selain itu, Muamalat juga menunjukkan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 32,5% dari Rp.9,34 Trilliun pada Juni 2008 menjadi Rp. 12,38 Trilliun pada Juni 2009. Pertumbuhan tersebut juga dialami oleh pertumbuhan penyaluran pembiayaan sebesar 15,8% dari Rp.9,61 Trilliun pada Juni 2008 menjadi Rp.11,13 Trilliun pada Juni 2009.

Foto : Repro

Agus Muharram, Deputi Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM

"Selama ini KUKM berkembang dengan pesat berbagai bisnis mikro yang ada telah mempengaruhi pertumbuhan di sektor riil"

Diperlukan Strategi Khusus Agar KUKM Berkembang

Foto : Repro

Deputi Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Agus Muharram di acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kuningan Jakarta mengatakan seiring lahirnya Undang-Undang NO. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maka Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kedepannya berperan sebagai koordinator kebijakan dalam mengembangkan koperasi dan UKM.

Dengan demikian peran dari Kemenkop dan UKM sangat terbatas. Maka dari itu kedepan diperlukan strategi khusus agar koperasi dan UKM (KUKM) bisa berkembang dengan baik. "Hal inilah yang dibutuhkan peran dari KADIN dalam mendorong peran KUKM di Indonesia bisa berkembang dengan cepat", kata Agus Muharram

Selama ini, menurut Deputi Pembiayaan---KUKM berkembang dengan pesat berbagai bisnis mikro yang ada telah mempengaruhi pertumbuhan di sektor riil. Pengembangan semua itu tak lepas dari program pemerintah melalui

Kemennegkop UKM yang terus konsisten dalam mengawal pasal 33 UUD 1945.

Dalam *road map* UMKM yang akan dibuat oleh KADIN, Agus Muharram berharap agar KADIN memahami persoalan yang dihadapi oleh pelaku KUKM diantaranya adalah, kelembagaan, pembiayaan, produksi dan pemasaran, sumber daya manusia dan kemitraan. "Kelima aspek tersebut yang selama ini dikembangkan oleh Kemennegkop UKM untuk menjawap permasalahan yang terjadi selama ini", ujar Agus Muharram.

Maka dengan adanya road map UMKM yang kini disusun oleh KADIN, Agus Muharram memandang bahwa permasalahan pengembangan UMKM sudah saatnya dipecahkan secara bersama-sama dan saling membangun komitmen.

"Dengan demikian meskipun peran Kemennegkop UKM hanya sekedar koordinasi tapi pengembangan UMKM terus dilanjutkan", pungkasnya. *•Agus Y.*

Foto : Repro

Foto : Repro

Foto : Repro

Mennegkop :

Industri Kreatif Butuh Dukungan Pembiayaan

Maraknya industri kreatif yang ada selama ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait. Maka dari itu, Menteri Negara Koperasi (Mennegkop) dan UKM , Suryadharma Ali, berharap adanya dukungan pembiayaan untuk industri kreatif, yang dianggap selama ini dukungan tersebut masih kurang maksimal.

Industri kreatif, menurut Mennegkop dan UKM perlu didefinisikan terminologinya, selama ini sudah banyak jenisnya seperti handycraft, alat komunikasi termasuk komputer dan animasi. "Karena terminologinya belum didefinisikan, sehingga pembiayaan industri kreatif jauh dari dukungan lembaga keuangan", ujar Mennegkop.

Untuk memberikan motivasi pada industri kreatif Mennegkop juga meminta agar industri kreatif dikembangkan secara fokus dan terencana. "Sehingga kedepan dalam perkembangannya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat", kata Mennegkop.

Lantas kapan dilakukan pembiayaan pada industri kreatif? Mennegkop menjelaskan di tahun 2010 akan dilakukan. Untuk memformalisasikan tersebut, Kemennegkop UKM menjalin komunikasi dengan Depertamen Perindustrian dan Perdagangan.

Selain itu Mennegkop juga menyarankan sebelum industri kreatif tersebut mendapatkan pembiayaan, alangkah baiknya dilakukan penilaian dahulu. Untuk itu ia berharap agar lembaga penilai yang selama ini melakukan penilaian dioptimalkan seperti lembaga penjaminan. ♦*Agus Y.*

Foto : Repro

Penyaluran KUR Berjalan Mundur

Akibat Krisis Ekonomi Global

Pengamat ekonomi dan sekaligus dosen Universitas Gajah Mada (UGM) Anton A Priyantono mengatakan mundurnya penyaluran Kredir Usaha Rakyat (KUR) dalam satu semester di tahun 2009 yang dilakukan oleh 6 bank pelaksana disebabkan karena pengaruh krisis keuangan global.

"Akibat krisis keuangan global itulah bank-bank pelaksana lamban dalam menyalurkan KUR di semester ini,"kata Anton saat berbicara di acara dialog nasional yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) dengan tema: "Efektivitas Penyaluran KUR Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Krisis keuangan global di bulan Desember 2008 mempengaruhi perbankan nasional, perbankan mengalami krisis likuiditas dan *seret* melakukan pembiayaan. Hal yang sama juga dialami oleh—pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga kena dampak krisis keuangan global. Mereka akhirnya juga enggan dalam mengakses pembiayaan. "Jadi, kemunduran penyaluran KUR di semester 2009 bukan hanya disebabkan karena 6 bank pelaksana tapi juga pelaku UMKM juga salah satu faktor juga," ungkapnya.

Terkait kemunduran KUR di tahun 2009 yang hanya sekitar Rp 2 Triliun di semester pertama 2009, Anton menyarankan agar penyaluran KUR perlu di evaluasi kembali sehingga penyaluran KUR bisa efektif. •*Agus Y.*

Sekjen IAEI :

Penawaran Sukuk Diminta Lebih Transparan

Foto : Repro

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Agustianto mengomentari adanya sosialisasi penawaran sukuk dengan cara lelang yang dilakukan oleh pemerintah, dengan tegas meminta agar lelang tersebut lebih transparan pada publik. Transparasi yang dimaksudkan oleh Sekjen IAEI adalah sukuk itu digunakan untuk pembiayaan apa saja.

"Jangan sampai sukuk yang ditawarkan selama ini hanya untuk penambahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tapi tidak diperjelas APBN sektor mana saja yang akan mendapat penambahan dana dari instrumen sukuk tersebut", papar Agustianto.

Dalam penawaran sukuk harus jelas, sukuk tak bisa digunakan untuk pembiayaan yang tak jelas. Maka dari itu dalam, kata Agustianto dalam penawaran sukuk harus disebutkan untuk pembangunan infrastruktur seperti apa? Misalnya jalan tol, bandara dan dan lain-lain. Semua itu harus di paparkan secara lengkap.

"Selama ini masyarakat masih merasa belum paham tentang sukuk sementara pemerintah hanya bicara untuk APBN saja dan tidak memberikan rincian yang jelas", ungkapnya.

Sedangkan sekretaris Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanudin, terkait dengan mekanisme lelang dalam penawaran sukuk masih memelajari mekanisme tersebut. Ia berharap dalam proses lelang tersebut nilai-nilai syariah menjadi pedoman.

Sementara Dirjen Pengelolaan Utang Negara, Rahmat Waluyanto mengatakan—jika dalam proses lelang sukuk lebih transparan dan masyarakat akan dijelaskan secara rinci untuk apa saja dana-dana tersebut.

Kemudian mengenai koordinasi dengan DSN dalam lelang, bahwa Depkeu sebelum leleng telah berkordinasi dengan DSN. "Tentunya dengan melakukan sosialisasi ini sudah berkordinasi dengan MUI", paparnya. ♦*Agus Y.*

Foto : Repro

Mennegkop UKM: "BI Checking Hukumnya Sunah"

"Jika dilihat dari FDR bank syariah selama ini 100% lebih disalurkan pada sektor riil khsusnya pelaku UMKM"

Menteri Negara Koperasi dan UKM, Suryadharrma Ali dalam acara temu nasional Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) di hotel Grand Cempaka di Jakarta Pusat, meminta pada Bank Indonesia (BI) agar peraturan BI Checking yang selama ini diberlakukan oleh perbankan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak bersifat wajib. Dia meminta BI Checking yang selama ini diperlakukan pada UMKM bersifat sunah. "Biarkan perbankan sendiri yang menentukan BI Checking tersebut berdasarkan kriteria yang dimilikinya", ujar Mennegkop dan UKM.

Regulasi BI Checking yang dikenakan pada pelaku UMKM, menurut Mennegkop, selama ini dianggap menghambat penyaluran pembiayaan perbankan pada pelaku UMKM, termasuk diantaranya adalah dalam program menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di BI Checking tersebut, UMKM dikenakan aturan-aturan seperti *bankable* dan *feasible* versi BI. Jika hal ini dilakukan maka UMKM sangat sulit mengikuti aturan tersebut.

Penyaluran pembiayaan pada UMKM sangat penting dan berdasarkan survei BI selama ini menyebutkan jika pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pembiayaan selalu lancar. Hal ini menandakan jika UMKM sangat kecil kemungkinan untuk lari dari tanggung jawab jika pembiayaannya macet.

"Mereka tak mungkin kabur ke luar negeri jika macet, jangankan pergi ke luar negeri, membeli tiket ke luar negeri dan hidup di sana tak mungkin mampu", ujar Mennegkop sambil bercanda.

Kemudian Mennegkop mengatakan, saat ini perkembangan UMKM sudah mencapai 50 juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut jika dimitrakan dengan perbankan akan menambah kekuatan UMKM Indonesia. Untuk itu relasi anatara UMKM dengan perbankan harus ditingkatkan.

Dengan melalui forum KKMB tersebut, Mennegkop akan membantu UMKM untuk bisa mengakses pembiayaan dari perbankan dan sekaligus memberikan advokasi pada pelaku UMKM.

Sedangkan Deputi Direktur Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, Y. Santoso Wibowo menyebutkan, 49 persen pembiayaan perbankan adalah UMKM. Sedangkan untuk perbankan syariah ia mengatakan masih sangat kecil sekali dan masih kalah dengan BRI—karena *market share* yang dimiliki oleh bank syariah masih di bawah 5%.

Sementara di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) A. Riawan Amin menyambut baik usulan pemerintah tersebut jika BI Checking menjadi kewenangan tersendiri bagi perbankan. Dengan demikian seperti bank syariah akan lebih berkomitmen dalam menyalurkan pembiayaan pada pelaku UMKM.

"Apalagi jika dilihat dari FDR bank syariah selama ini 100% lebih disalurkan pada sektor riil khsusnya pelaku UMKM", pungkasnya. • *Agus Y*

Pelaku UMKM
Meminta Persoalan BI Checking di Follow Up

Permasalahan peraturan BI Cecking pembiayaan pada pelaku UMKM mendapatkan respon tegas dari para pelaku UMKM, mereka meminta agar peraturan tersebut dihapus sehingga dengan mudah pelaku UMKM mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Nur Kartiko Wulan, Pengurus Pengrajin Mebel dan Ukiran Jawa Tengah—saat dikonfirmasi menyesalkan adanya aturan BI Checking yang diterapkan pada pelaku UMKM dengan aturan tersebut perbankan sangat enggan untuk memberikan pembiayaan.

Padahal, kata Nur Kartiko, pelaku UMKM saat ini membutuhkan modal untuk produktifitas usaha—jika hal ini tak memperoleh suntikan dana dari perbankan akan menggangu bisnis pelaku UMKM.

Sebelumnya, Menteri Negera Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali—mengatakan bahwa BI Cecking bagi pembiayaan UMKM harus ditiadakan karena hal ini bisa mengganggu pemerintah dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Jika hal itu tidak dihapus akan berpengaruh pada program KUR selama ini", paparnya.

Sementara pengamat Lembaga Keuagan Mikro Syariah (LKMS)—Noer Azis mengatakan—bahwa dengan BI Checking pengembangan sektor riil yang dimotori oleh UMKM akan berhenti. Hal ini jelas bahwa pemerintah tidak mendukung majunya pertumbuhan ekonomi kerakyatan. "Dengan BI Checking secara otomatis perbankan gagal dalam melakukan intermediasi", ujarnya. •*Agus Y*

Kemennegkop dan UKM

Minta BI Segera Melonggarkan Kebijakan BI Checking Untuk UKM

Kementerian Negara Koperasi dan UKM meminta Bank Indonesia (BI) untuk segera melonggarkan kebijakan BI checking yang dilakukan secara selektif terhadap pelaku UMKM yang telah melakukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibawah Rp. 5 juta yang perlu ditinjau kembali.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Bank Syariah Mandiri (BSM), Yuslam Fauzi, salah satu bank penyalur dana KUR yang ditunjuk oleh pemerintah, mengatakan, bukan berarti pihaknya gagal dalam menyalurkan dana KUR, tetapi adanya mekanisme penyaluran KUR bagi bank pelaksana yang sangat ruwet.

"Itulah yang menjadikan kami lamban dalam menyalurkan dana KUR tersebut", ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Yuslam, agar penyaluran KUR ini lebih cepat, dibutuhkan mekanisme penyaluran KUR yang efektif.

Sementara itu, Menteri Negara Koperasi dan UKM (Mennegkop dan UKM), Drs. H. Suryadharma Ali, MSi, mengusulkan adanya kelonggaran ketentuan BI *checking* khusus untuk kredit mikro.

"Kredit mikro itu *kan* Rp. 50 juta ke bawah. Kalau itu masih dianggap berat yang Rp. 50 juta ke bawah yang mikro itu, bisa saja setengahnya yakni Rp. 25 juta ke bawah yang disalurkan. Karena dengan adanya kelonggaran itu tidak berarti bahwa bank-bank pelaksana kredit mikro itu akan mengabaikan prinsip-prinsip *prudential* (kehati-hatian) mereka. Itu pertimbangan saya sebagai menteri koperasi untuk BI", ujar Suryadharma Ali kepada wartawan, di kantornya.

Diakuinya, salah satu alasan mengapa terjadi perlambatan penyaluran KUR kepada usaha mikro kecil dan koperasi salah satu faktornya adalah adanya kebijakan BI *checking*.

Dengan tidak optimalnya enam bank plat merah dalam menyalurkan KUR tersebut, Suryadharma Ali berwacana akan menggandeng bank swasta dalam menyalurkan dana KUR.

"Kenapa saya berwacana seperti itu, agar antara bank plat merah penyalur KUR dengan bank swasta yang nanti kita tunjuk, ada suatu kompetisi", ungkapnya.

Seperti diketahui, penjaminan dana KUR itu sudah ada penjaminan dari pemerintah sebesar 70%. Itu artinya penyaluran tersebut akan beresiko.

"Resiko perbankan sudah diminimalisir oleh dana penjaminan itu, sedangkan BI *checking* itu artinya adalah untuk meminimalisir resiko. Sekarang resiko itu sebagian besar 70% sudah ditanggung oleh pemerintah. Kalau memang para bank pelaksana KUR ini sudah keberatan untuk melaksanakan penyaluran kredit itu, saya kira kita harus memberikan kesempatan kepada bank-bank lain, yakni bank swasta, biar program penyaluran KUR ini tidak macet ke depan", katanya.

Pasalnya, menurut Suryadharma Ali, program penyaluran KUR ini dirasa penting adanya, karena program ini dirasa mampu mengentaskan angka kemiskinan, mampu menciptakan lapangan kerja dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
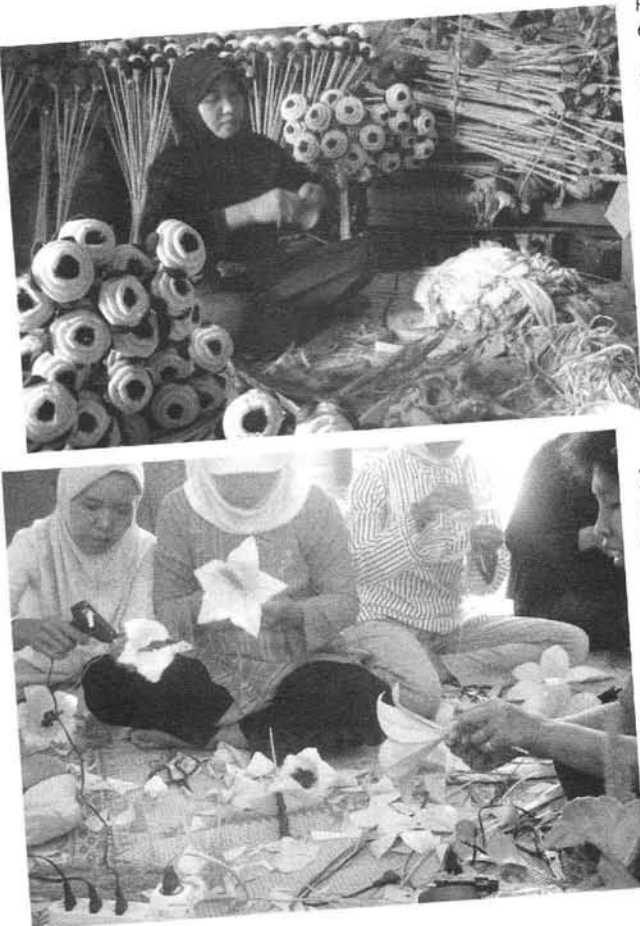
"Jadi program KUR ini sangat efektif untuk merealisasikan ketiga hal tersebut", tegas Suryadharma Ali.

Hingga kini, lanjutnya, masyarakat usaha mikro kecil dan koperasi yang mengakses program ini lebih dari 1,9 juta debitur.

"Mungkin kalau menurut analisa kasar saya, kalau setiap orang itu menanggung 5-6 orang, suami istri 2 orang dan memiliki anak 3 orang, tambah dia punya pegawai satu orang, maka *multiplier* efeknya luar biasa banyaknya. Kalau 6 orang dikalikan 1,9 juta orang, maka jumlah orang yang mengakses KUR itu kurang lebih 10 juta orang lebih. Itu *kan* luar biasa banyaknya. Tetapi itu baru analisis kasarnya saja", sergahnya.

Sebetulnya, sambungnya, hingga 7,2 juta orang yang disalurkan dana KUR tersebut, belum terdengar kabar adanya masalah.

"Tahun 2008 masih ada sisa dana KUR ini Rp. 2 triliun, sisanya. Kemudian untuk 2009, baru terpakai, kira-kira Rp. 2 triliun untuk segera disalurkan dana KUR ini. Jadi tidak ada masalah dari sisi itu", paparnya.

Ditegaskan, usulan solusi ini yang dikhususkan ditujukan kepada BI, agar sekali lagi melonggarkan peraturan BI *checking* ini khususnya untuk kredit mikro, karena memang adanya alasan dari bank-bank pelaksana bahwa perlambatan penyaluran KUR ini salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan BI *checking*.

Kendati demikian, Suryadharma Ali menyerahkan sepenuhnya pengecekan penyalur KUR ini kepada pihak perbankan yang ditunjuk oleh Kemennegkop dan UKM untuk menyalurkan dana KUR.

"Pihak bank *lah* yang tahu reputasi si peminjam dana KUR ini baik atau tidak. Misalnya, melihat reputasi si peminjam baik itu *kan* mudah sekali sebetulnya, angsuran tiap bulan terbayar kalau telat dua hari itu *sih* biasa-biasa saja. Tetapi tiap bulan angsurannya terbayar. Itu *kan* sudah terlihat bahwa si peminjam atau si debitur itu taat asas. Itu masuk ke dalam orang yang berkualitas di dalam mengembalikan dana pinjaman KUR ini. Kalau yang seperti itu, si peminjam layak untuk diberi lagi dana KUR ini", tandasnya.

Realisasi KUR hingga semester I, 30 Juni 2009 sebesar Rp. 14,882,6 miliar untuk 2.025.087 debitur. Rata-rata kredit per debitur Rp. 7,35 juta. Sedangkan realisasi KUR per 31 Mei 2009 sebesar Rp. 14.514,9 untuk 1.956.964 debitur atau rata-rata kredit per debitur Rp. 7,42 juta.

Realisasi kredit meningkat sebesar Rp. 367.7 miliar (2,53%) dan debitur meningkat sebanyak 68.123 (3,48%) dan rata-rata kredit turun sebesar Rp. 0,07 juta (0,92%). •*Agus Y.*

Mennegkop dan UKM :

"BI Tak Menyetujui Kelonggaran BI Checking"

Menteri Negara Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali, mengatakan—dalam rapat kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh stakeholder menyebutkan, jika Bank Indonsia (BI) tidak menyetujui adanya kelonggaran BI checking. Karena menurut BI, aturan BI checking merupakan mekanisme untuk mengamankan pembiayaan.

Pernyataan Menekop dan UKM tersebut disampaikan saat acara konferensi pers terkait masih enggannya BI untuk tidak mengubah aturan regulasi BI checking pada pelaku UMKM di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Kuningan – Jakarta, Jumat (31/7).

Kemudian terkait dengan rendahnya penyaluran KUR yang dilakukan oleh 6 bank pelaksana (BRI,Bank Mandiri, Bank Bukopin, BTN, BSM dan BNI), Suryadharma Ali mengatakan ada upaya penyaluran KUR jilid kedua yang dilonggarkan. Dalam pelonggaran tersebut tidak hanya sekedar perluasan bank pelaksana dalam menyalurkan KUR tapi aturan-aturan KUR perlu diperlonggar.

"Pelonggaran tersebut bukan mengabaikan prinsip prudential (kehati-hatian), maka dalam masalah BI checking diserahkan pada bank pelaksana", kata Suryadharma Ali.

Sementara Komite Kebijakan KUR Kementerian Koordinator Perekonomian, Zureidar menilai dalam penyaluran KUR perlu kebijakan tersendiri melihat animo masyarakat untuk KUR sangat tinggi.

Melihat fenomena hambatan dalam KUR ini, Zubaidar menganggap bisa diatasi melihat dari perubahan kebijakan yang akan diterapkan dalam KUR. Beberapa pertimbangan tersebut diantaranya adalah: Pertama, yang membobol bank itu yang besar bukan yang kecil. Kedua tiingkat pengembalian debitur bagus. Ketiga hasil survei BI bahwa kredit mikro itu NPL-nya rendah dan mereka selalu dapat mengembalikan berapa pun jumlah bunganya.

"Yang mereka butuhkan adalah kesempatan dan kemudahan mendapatkan kredit. Itu yang mereka perlukan", ujarnya. • *Agus Y.*

KONSORSIUM STEMBI BANDUNG - PPBMB
BANDUNG BUSINESS SCHOOL

PEMBINA & PEMBERI BEASISWA UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI

Jl. BUAH BATU 26 / JL. GURAME 21 Bandung. Telp. 022-7307722,7310109,7309947 Fax. 022-7307967

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM IKATAN DINAS BEASISWA

No. 011/STEMBI-PPBMB/I/2009

STEMBI Bandung membuka kesempatan kepada pemuda/i Indonesia potensial untuk mengikuti pendidikan profesional akademis, dengan Program Ikatan Dinas dan Beasiswa guna memenuhi lonjakan kebutuhan Sarjana Ekonomi (SE) dan Ahli Madya (AMd) untuk ditempatkan menjadi dosen, peneliti dan profesional bisnis bidang Akuntansi dan Manajemen :

PROGRAM STUDI S1, KONSENTRASI :

MANAJEMEN :

1. Manajemen Keuangan
2. Manajemen Pemasaran
3. Manajemen SDM
4. Manajemen Industri
5. Manajemen Rumah Sakit
6. Manajemen Perbankan
7. Manajemen Informatika
8. Manajemen Syariah

AKUNTANSI :

1. Akuntansi Keuangan
2. Akuntansi Perpajakan
3. Akuntansi Perbankan
4. Akuntansi & Pasar Modal
5. Akuntansi Manajemen
6. Ssistem Informasi Akuntansi
7. Pemeriksaan Akuntansi
8. Akuntansi Syariah

PROGRAM D1 :

1. English For Special Purposes
2. Business Administration & Computer
3. Executive Secretary & Computer
4. Entrepreneurship & Business Skill
5. Management Computer
6. Accounting Computer
7. Computer Programming

PROGRAM D3 :

MANAJEMEN :

1. Sekretaris
2. Public Relation
3. Retail
4. Keuangan

AKUNTANSI :

1. Perpajakan
2. Sistem Informasi
3. Ekspor Impor
4. Perbankan

SYARAT PENDAFTARAN

1. Biaya pembelian formulir pendaftaran Rp. 150.000,-
2. Fc ijasah dan Daftar Nilai Ujian Nasional/NEM (2 lbr)
3. Pas photo 2 x 3 (3lbr), 3 x 4(2lbr) & 4 x 6 (1lbr)
4. Fotokopi Raport dan / atau
   Surat Keterangan Peringkat Kelas dari Wali Kelas
5. Pendaftaran sampai 30 Agustus 2009
7. Untuk pendaftaran melalui Pos, mengirimkan
   Poin 1(bukti pembayaran), poin 3 dan poin 4
8. Biaya pendaftaran bisa ditransfer melalui:
   BANK Saudara Buah Batu
   No. Rek. 120-10-3030 a.n. YMMI
   BANK MANDIRI Asia Afrika
   No. Rek. 130-00-9904334-4 a.n. YMMI
   BANK BRI KCP Buah Batu
   No. Rek. 1141.01.000025.30.8, a.n. YMMI

KETENTUAN

1. Lulusan SMA, SMK, MAN (Sederajat) semua jurusan, lulusan maksimal 3 tahun terakhir
2. Lulusan SLTA rangking 1 -10 langsung diterima TANPA TES (hanya wawancara)
3. Beasiswa yang diberikan sebesar Rp 1.500.000,- (S1) dan Rp 1.000.000,- (D3) tiap semester.
4. Lulus dengan mendapat penempatan kerja
5. Waktu belajar sangat optimal dengan semester pendek, waktu kuliah singkat: S1=3th dan D3=2th

Ketua Konsorsium PPBMB

Ttd.

Dr. H. Budi Djatmiko. Ir., MSi.

Ketua STEMBI Bandung

Ttd.

Prof. Dr. H. Moch. Idochi Anwar, SE., MPd.

Bagi pendaftar yang membawa iklan ini dapat ditukar dengan Flashdisk

Ucapan Terimakasih
Mitra STIE STEMBI Bandung

Telkomsel
Bank BRI
Bank BCA
Bank Farma
Bank BNI
Bank Bukopin
Bank BTPN
PT Kimia Farma
PT Sibatex Abadi
Bank Danamon
BMT Daarut Tauhiid
Hotel Horison Bandung
RSHS Al-Islam Bandung
Voucher-link Group
PT BITA Enarcom Engineering
PT Setia Galeda Nusantara
PT Kanebo Tomen Sandang
PT Ultra Jaya Milk Industry
Bank Indonesia
PT Grandtex
Bank NISP
Jonas Photo
Bank Mandiri
Bank BPR
HU Galamedia
PT Agronesia
PT PINDAD
MQ Radio
PT INTI
Bank HS 1906
Roti Merdeka
Bursa Efek Jakarta
PT POS INDONESIA
PT. Telkom Indonesia
HU. Pikiran Rakyat
PT. HM. Sampoerna
PT Shangjaya Food
Bursa Efek Jakarta
PT Fajar Putra Pratama
PT PLN Jabar & Banten
Hotel Grand Pasundan
DALE Advertising
TRIBUN JABAR
Dekopinda Kota Bandung
Hotel Panghegar
BAPPEDA JABAR
Perum Perumnas
PT HM Sampoerna
PT Saung Udjo
CV Astri Mandiri
UNASCO 99.5 FM
dll.
PT Panca Bakti Multionara
CV Dinamika Insani Teknik
PT Dirgantara Indonesia
CV Kautsar Utama
CV Hana Grafika

STEMBI BANDUNG BUSINESS SCHOOL

Tlp. 022-7307722, 7310109 Fax. 022-7307967
Website : www.stembi.com
E-mail : stembi_bdg@yahoo.co.id
Kirim Brosur: <Nama>_<Alamat> kirim ke 022-71294827

Direktur Islamic Research and Training Institute (IRTI), Bambang PS Brodjonegoro, sangat optimis jika Indonesia akan menjadi pusat keuangan syariah terbesar di dunia. Potensi pasar dan sumber daya alam yang melimpah merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan ekonomi syariah kedepan. Untuk mempersiapkan hal tersebut, ia bersama IRTI mengembangkan penelitian dan pelatihan bagi para banker syariah dalam mengoperasikan perbankan dengan sistem bagi hasil tersebut. Dengan IRTI saat berbicara dengan Agus Yuliawan dari KBES, ia berharap bisa menjadi jembatan bagi kebutuhan SDM perbankan syariah yang kian hari kian bertambah. Apa maksudnya? Berikut petikkan wawancaranya:

Bambang PS Brodjonegoro
Direktur Islamic Research and Training Institute (IRTI)

IRTI Jembatan Kebutuhan SDM Perbankan Syariah

Apakah benar Islamic Research and Training Institute (IRTI) merupakan lembaga dibawah Islamic Developmen Bank (IDB) dalam mengembangkan ekonomi syariah?
Iya benar. IRTI didirikan selama ini oleh IDB untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi Islam di berbagai negara.

Apa yang menjadi fokus IRTI selama ini dalam mengembangkan ekonomi Syariah?
Kami selama ini fokus pada penelitian dan training dalam mengembangkan ekonomi syariah. Alasannya, kami melihat selama ini permasalahan Sumber Daya Manusia di perbankan syariah merupakan permasalahan yang utama yang harus cepat diselesaikan. Tanpa pengembangan SDM ekonomi syariah, kami yakin perbankan syariah di negara manapun sulit untuk maju.

Kenapa?
Yah, Anda harus tahu bahwa mengoperasikan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah tak sesederhana yang dipahami. Ada beberapa ketentuan dan prasyarat yang harus dimiliki oleh pelaku dalam mengoperasikan sistem keuangan syariah tersebut. Tentunya mereka harus benar-benar memahami tentang nilai-nilai syariah yang tertuliskan pada Al-Quran dan Hadist.

Lalu bagaimana Anda melihat SDM Perbankan Syariah yang ada selama ini di Indonesia?
SDM Perbankan Syariah Indonesia sangat lemah sekali dan harus disempurnakan, apalagi jika melihat dari inovasi produk yang dikembangkan oleh perbankan syariah Indonesia sangat minim sekali. Padahal banyak sekali skim yang bisa dikembangkan dalam inovasi produk di perbankan syariah, dengan keterbatasan SDM yang ada selama ini, membuat beberapa skim tersebut tak bisa dikembangkan oleh para *banker* syariah.

Bagaimana solusinya agar para SDM perbankan syariah berkualitas?
Justru kehadiran IRTI memberikan solusi bagi mereka bagaimana cara yang terbaik dalam mengoperasikan dan mengembangkan perbankan syariah. Di program IRTI, kami selalu mengeluarkan penelitian-penelitian tentang lembaga keuangan syariah yang bisa menambah pengetahuan bagaimana mengelola perbankan syariah yang baik. Selain itu kami juga melatih para *banker-banker* syarah agar lebih kompetitif dan bersaing dalam merebut pasar.

Selain itu apa lagi?
Kami juga menerbitkan publikasi berupa buku-buku dan jurnal yang kami berikan pada masyarakat secara luas yang ingin mempelajari sistem ekonomi syariah.

Kebutuhan SDM di lembaga keuangan syariah dirasakan sangat besar hal ini juga direspon oleh lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan studi ekonomi syariah. Menurut Anda apakah itu belum cukup?
Hadirnya lembaga-lembaga pendidikan tersebut sebenarnya sangat bagus dan sekaligus untuk mempersiapkan para SDM di lembaga keuangan syariah. Tapi yang menjadi permasalahan saat ini kurikulum ekonomi syarah yang standar belum dimiliki oleh lembaga pendidikan di Indonesia. Sehingga sangat susah. *Lagian* persepsi industri juga masih beragam, SDM ekonomi syariah yang bagaimana yang sesuai dengan standar tersebut.

Jadi perlu sebuah kurikulum ekonomi syariah tersendiri?
Iya kami sangat setuju hal itu, kurikulum ekonomi syariah harus segera terwujudkan. Maka dari itu kini IRTI menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum ekonomi syariah.

Apakah selama ini IRTI berkomunikasi dengan Departemen Pendidikan Nasional ?
Belum. Kami belum menuju kesana. Tapi kami tetap mendorong juga agar Diknas segerka mengeluarkan kebijakan tersebut. Sehingga permsalahan SDM perbanan syariah akan segera teratasi.

Menurut pandangan Anda berapa jumlah SDM yang dibutuhkan oleh perbankan syariah kedepan?
Sangat banyak sekali apalagi jika semua skim itu dijalankan kami rasa semakin besar kebutuhan para SDM dalam menggerakkan sektor riil. ♦

Tarif Iklan Ekono-mix Syariah

UKURAN	BW	FC
DISPLAY		
Cover depan		Rp. 25.000.000,-
Cover depan (dalam)		Rp. 18.000.000,-
Cover belakang		Rp. 20.000.000,-
Cover belakang (dalam)		Rp. 18.000.000,-
1 Halaman	Rp. 10.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
1/2 Halaman	Rp. 5.000.000,-	Rp. 7.500.000,-
1/3 Halaman	Rp. 3.500.000,-	Rp. 5.000.000,-
1/4 Halaman	Rp. 2.500.000,-	Rp. 3.500.000,-
PARIWARA		
1 Halaman	Rp. 9.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
2 Halaman	Rp. 18.000.000,-	Rp. 24.000.000,-

Keterangan :

1. Tarif belum termasuk Diskon & PPn 10%
2. Iklan Kontrak mendapatkan Diskon Khusus
3. *Booking Space* paling lambat 15 hari sebelum naik cetak
4. Materi diterima 7 hari sebelum naik cetak
5. Pembatalan order paling lambat 10 hari sebelum naik cetak
6. Materi disediakan oleh pemasang dalam bentuk CD

Untuk Booking Iklan Dapat Menghubungi :

Aceng : 022-4241257
Hadi Prana : 0251-3998574
Agus Yuliawan : 021-44322344

Menteri Pertanian Resmikan RPH International

Menteri Pertanian Anton Apriyantono meresmikan rumah pemotongan hewan (RPH) halal, Senin (29/06/09). Bertempat di Bubulak Bogor RPH ini akan disiapkan sebagai RPH berskala international. Diharapkan nantinya RPH yang memakan dana sebesar Rp. 8 milyar ini akan menjadi standar percontohan RPH-RPH lainnya di Indonesia.

RPH yang telah mendapatkan sertifikat halal beserta tukang sembelihnya sangat representatif untuk menjadi RPH halal pertama yang berkelas dunia. Melihat lokasi dan tempatnya RPH dengan luas 5 hektar ini sangat memungkinkan menjadi contoh dunia. "RPH ini bisa menjadi RPH berskala Internasional asalkan dikelola dengan benar, tidak asal-asalan" ungkap Anton.

Agar pengelolaan RPH ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar international, maka, kata Anton, tidak harus segan untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan harus terus melakukan evaluasi demi pengelolaan RPH yang baik. Dari sisi manajemen perlu dikelola secara profesional dan perlu ditata dengan rapi seperti halnya sebuah RPH berproduksi.

Sebagai komitmen pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengadaan pangan yang aman dan meyehatkan bagi masyarakat Anton menawarkan bantuan agar RPH Terpadu Bubulak menjadi RPH Internasional. Anton menganjurkan agar segera melakukan pengajuan anggaran RPH internasional untuk periode anggaran 2010.

"Ketersediaan kehalalan pangan dan pengamanan makanan segar itu menjadi tanggungjawab Deptan", tegasnya. •*roel*

2011 Kota Bogor Menjadi *Kota Halal*
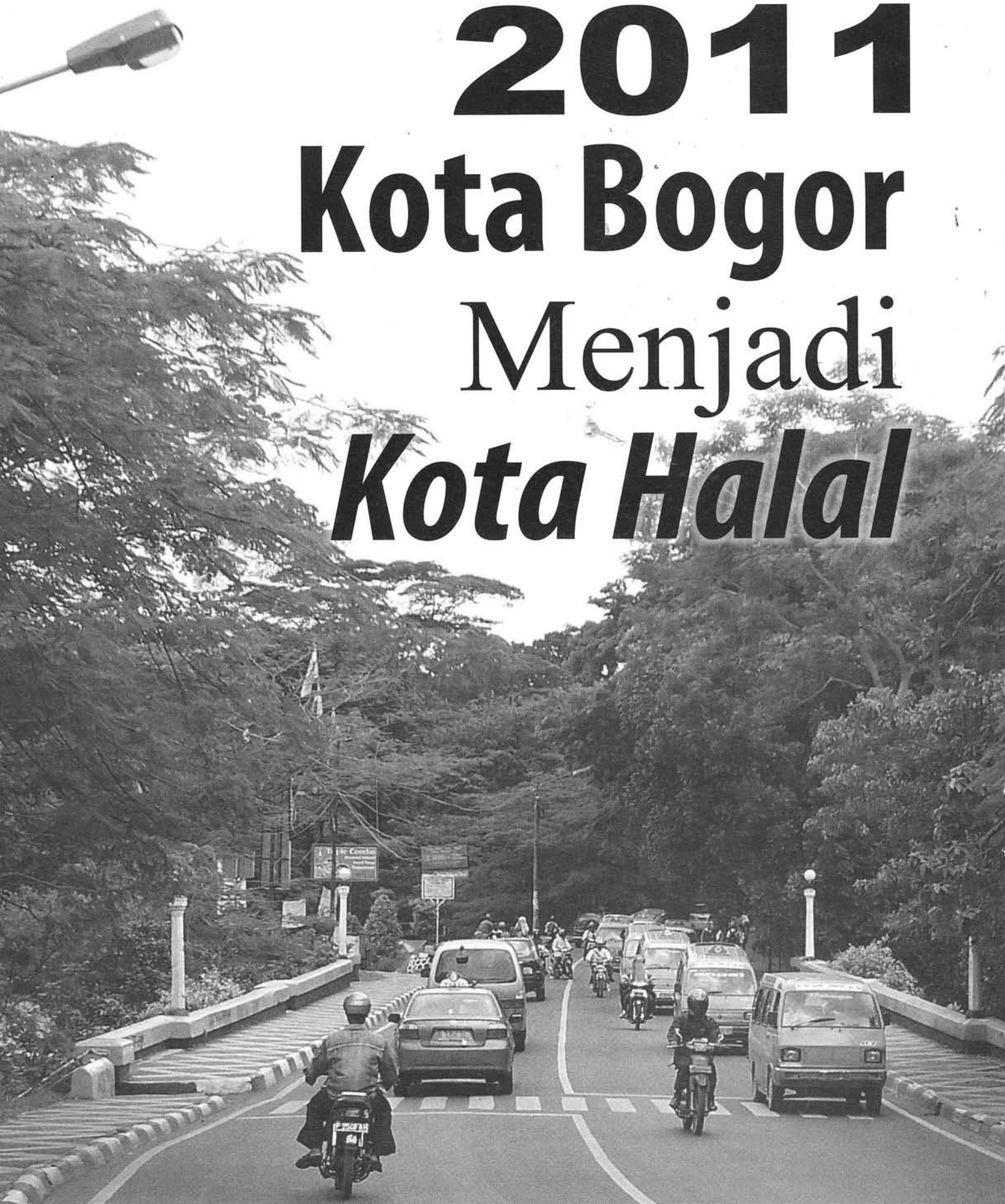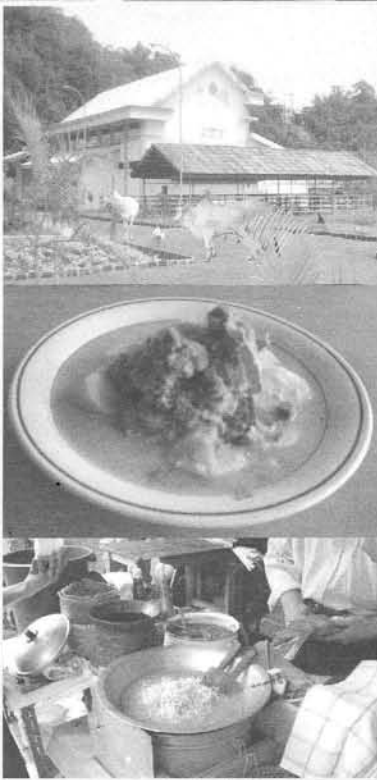
Proses perwujudan Kota Bogor menjadi kota halal terus diupayakan oleh pemerintahan kota Bogor. Ditargetkan pada tahun 2011 Bogor sebagai kota halal sudah terwujud. Sehingga nantinya Bogor akan menjadi kota yang memberikan kenyamanan bagi konsumen, terutama konsumen muslim.

Demikian disampaikan Diani Budiarto Walikota Bogor pagi ini setelah membuka acara workshop dan training internasional halal di Botani Square yang diadakan pada tanggal 27, 28, dan 29 Juli 2009.

"Kami terus berusaha untuk segera mewujudkan Bogor sebagai kota halal. Hal ini juga menjadi pertanggungjawaban kami untuk melindungi dan menjaga warga Bogor yang 90 persen muslim", jelas Diani.

Setelah dicanangkan pada tahun lalu, Bogor sebagai kota halal kini terus mengalami proses penyempurnaan. Seluruh infrastruktur yang mendukung sebagai kota halal telah dipersiapkan, seperti rumah potong hewan (RPH) yang telah mendapat sertifikasi dari lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan kosmetika (LPPOM-MUI). Disamping itu, menurut Diani Budiarto, saat ini pemerintah telah menyiapkan tim khusus untuk menggodog terwujudnya kota halal ini, terutama untuk mempersiap regulasi (red: perda) terkait halal.

"Saat ini kami belum memiliki regulasi yang mendukung kota halal. Untuk itu kami harus mempersiapkannya", tegasnya. "Dan sekarang kami telah bekerjasama dengan LPPOM-MUI untuk memberikan pemahaman dan pelatihan kepada tim dan staf kami", tambahnya.

Ditargetkan sampai tahun 2011, perda halal sudah terbit dan seluruh UMKM, produsen, RPH maupun restoran semuanya telah terjamin kehalalannya. "Dengan seperti ini masyarakat yang datang ke Bogor tidak akan ragu lagi berbelanja dan/atau mengkonsumsi makanan di kota Bogor", jelas Diani.

Untuk mendukung seluruh upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Bogor Diani menjelaskan bahwa dibutuhkan pemahaman dan persamaan persepsi antara pelaku usaha dan pembuat kebijakan serta lembaga sertifikasi halal untuk mewujudkan sebuah kota yang di desain menjadi kota halal. ♦*roel*

Diani Budiarto, Walikota Bogor

Kota Bogor Akan Jadi Pusat Halal

Gagasan Kota Bogor menjadi kota halal akan segera diwujudkan. Ditargetkan pada tahun 2011 seluruh perdagangan dan jasa di kota Bogor akan memberikan layanan halal. Sehingga seluruh konsumen, terutama konsumen muslim, akan merasa terlindungi dan merasa nyaman untuk mengkonsumsi dan

Demikian disampaikan Walikota Bogor, Diani Budiarto, setelah membuka acara International Workshop and Training on Halal Assurance System di Botani Square, Bogor.

"Kami terus berusaha untuk segera mewujudkan Bogor sebagai kota halal. Hal ini juga menjadi pertanggungjawaban kami untuk melindungi dan menjaga warga Bogor yang 94,8 persen muslim", jelas Diani.

Labih lanjut Diani Budiarto menjelaskan kepada A Bahrul Muchtasib dari kantor berita ekonomi syariah terkait dengan rencana Bogor sebagai kota halal. Berikut petikan wawancaranya:

Terkait dengan rencana Anda akan menjadikan Bogor sebagai kota halal, apa yang mendasari gagasan tersebut?
Jadi pada prinsipnya pemerintah Kota Bogor ingin memberikan jaminan kepastian kepada warga masyarakat Bogor untuk semua produk yang beredar di Bogor itu halal. Warga Bogor 94,8 persen muslim, jadi kami ingin melindungi dan menjaga mereka. Saat ini sudah kami awali dengan fasilitas yang kami miliki, seperti rumah pemotongan hewan (RPH) sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, kemudian sedang di proses sertifikat halal secara nasional dan internasional.

Apakah semuanya nantinya harus halal?
Jadi, nanti semua produk yang beredar di Bogor akan di sertifikasi halal. Mulai dari industrinya hingga proses perdagangannya semuanya akan dijamin bahwa itu semua halal. Artinya, ada suatu kejelasan apakah suatu produk itu halal atau tidak. Baik itu makanan atau obat-obatan harus ada indikasi yang jelas apakah halal atau tidak.

Kalau di pasar tradisional bagaimana?
Sama, kita awasi juga. Baik perdagangan maupun produksinya.

Apakah ada pengaruh terentu terkait dengan kota halal ini, mungkin terkait dengan iklim bisnisnya atau wisata di kota Bogor?
Hal ini tidak akan mengganggu. Karena kita sebenarnya tidak mengurangi. Cuma, dalam prosesnya harus ada kejelasan. Misalnya makanan, itu harus jelas dari bahannya kemudian sajian menunya. Jadi hal itu bisa diperlihatkan kepada masyarakat. Kalau memang ada babi harus di tulis dengan jelas ada babinya. Dengan seperti ini masyarakat akan bisa memilah dan memilih.

Kapan target kota Bogor jadi kota halal diwujudkan?
Sekarang ini kita masih dalam proses. Kalau RPS sudah jalan, tinggal yang dipasaran ini yang masih dalam proses. Dengan departemen terkait, dengan para pengelola akan kita beritahukan seperti apa halal ini. Jadi kita tidak megurangi atau membatasi beredarnya suatu produk, tapi kita meminta kejelasan.

Apa tidak ada protes dari masyarakat, misalnya dari para pedagang yang memproduksi babi, karena untuk RPH babi kan sudah ditiadakan?
Sebenarnya itu sesuai dengan jumlah konsumen. Jumlah konsumen babi kan sedikit. Jadi, kalau ingin memotong babi silahkan di tempat yang lain. Tapi, untuk perdagangan babinya masih dimungkinkan, sepanjang masyarakat kita masih ada yang mengkonsumsinya.

Langkah-langkah apa yang akan di ambil jika dalam suatu produk dinyatakan halal tapi masih mengandung yang haram?
Kita akan berikan teguran, sangsi, dan sebagainya. Ini kan Perdanya belum ada. Jadi kita sekarang masih dalam rangka *trial and error*, dengan melakukan beberapa pendekatan. Dari beberapa kemungkinan yang ada akan kita ramu, jadi nantinya akan kita buat regulasinya yang seperti apa terkait dengan kondisi yang ada.

Kapan regulasi akan diterbitkan?

Untuk tahun ini kita sedang melakukan penjajakan, tahun depan sudah ada desiminasi dengan beberapa lembaga terkait, kelompok masyarakat, para pengusaha di bidang perdagangan, kemudian dengan departemen terkait, sehingga tahun depan sudah *running* dan kita segera membuat regulasi. Paling lambat tahun 2011.

Apakah 2011 itu juga terkait dengan seluruh pedagang kaki lima?

Iya, semua. Seluruh pedagang yang ada di kota Bogor harus disertifikasi. Nantinya, terserah konsumen untuk memilihnya. Kalau mereka memilih yang haram berarti menjadi tanggung jawab sendiri. Yang penting semuanya sudah jelas.

Apakah tidak dibuat sistem pengawasan?

Pengawasan memang perlu. Tapi akan kembali kepada masyarakat. Kalau semua produk sudah jelas indikasinya, menggunakan bahan-bahan apa saja, nantinya terserah masyarakat. Tapi, paling tidak pemerintah kota Bogor sudah memfasilitasinya. Sudah memberikan akses informasi kepada masyarakat bahwa produk-produk yang beredar mengandung unsur-unsur apa saja. Penerapan halal ini nantinya ada yang sifatnya nasional ada juga yang lokal. Kalau lokal kita bisa menentukan sendiri, tapi kalau nasional perlu ada pendekatan dengan departemen terkait. Seperti apa penerapan regulasinya. Misalnya, kasus vaksin meningitis yang sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Jadi terkait dengan ini pemerintah Kota Bogor harus melakukan pendekatan ke Depkes untuk kejelasan regulasinya.

Dalam hal sertifikasi halal ini Departemen Agama akan mengambil alih ke ranah pemerintah, menurut Anda bagaimana?

Buat kami tidak masalah. Siapapun yang akan mensertifikasi tidak masalah. Yang penting buat kami ini kan melayani masyarakat, jadi jangan sampai semua produk yang beredar ini tidak kami ketahui secara jelas mengindikasikan kandungan apa dan akan berdampak seperti apa. Soal nanti siapa yang *take over* tidak masalah.

Apakah tidak dimungkinkan akan menimbulkan *conflict of interest* dan masuknya kepentingan-kepentingan politik?

Hal ini kembali kapada *nawaitu* (niatnya). Kalau Depag mengambil alih demi kemaslahatan umat, itu akan kita *support*. Tapi kalau sebaliknya pasti kita tidak mendukungnya. Penduduk Indonesia mayoritas muslim, jadi pemerintah harus bisa memproteksi untuk kepentingan-kepentingan masyarakat muslim ini. Pemerintah harus bisa mengenyampingkan intervensi-intervensi dari pihak lain, dan kepentingan-kepentingan yang akan mempengaruhinya. Dasarnya yang harus kita lakukan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat muslim.

Masyarakat kota Bogor masih belum halal minded. Dimungkinkan nantinya saat sudah diterapkan Bogor sebagai kota halal akan muncul gejolak di masyarakat. Langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk mengatasinya?

Saat ini kami akan melakukan sosialisasi. Secara *door to door* kita sudah sering sampaikan ke masyarakat. Seperti kita memberikan permisalan ke masyarakat, apakah kita yakin daging ayam yang kita makan itu halal? Kalau dulu, saat kita mau menyembelih ayam itu harus nyari kyai atau ustadz, tapi sekarang kan orang yang tidak kita ketahui kapasitasnya. Yang seperti itu merupakan cara kami untuk menjelaskan kepada masyarakat. Jadi hal ini menjadi tugas kami dan jajaran Depag memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa *halalan thayyiban* itu harus dipahami dari sisi agama yang kuat.

Terkait dengan kondisi dilapangan yang banyak kita temukan logo-logo halal tapi belum jelas kehalalannya, menurut Anda bagaimana?

Nanti semuanya akan kita cek. Akan kita lihat kejelasannya, apakah memang halal atau tidak. Makanya, kami mengharapkan UU JPH ini nantinya memberikan kejelasan kepada seluruh instansi, seperti apa yang kita harapkan dengan halalan thoyyiban itu. Lantas, implikasi dan indikasinya seperti apa di lapangan. • *roel*
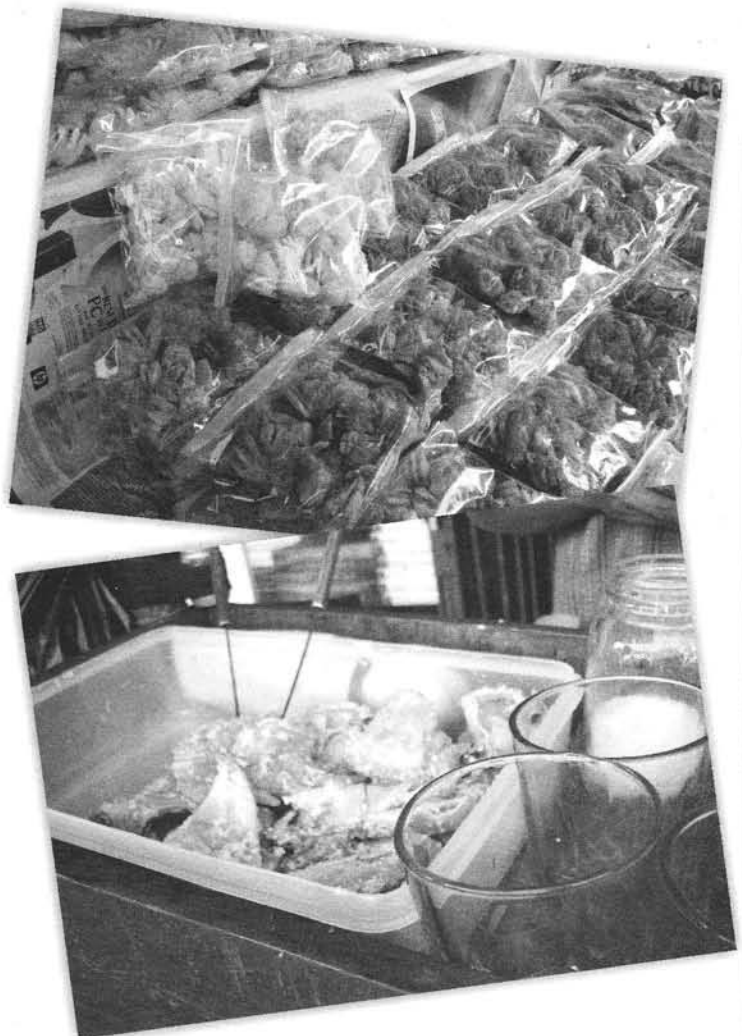
DSN-MUI Harus Kreatif Mendesain Fatwa Baru

Sering dengan perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia aktualisasi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang selama ini sebagai pegangan hukum dalam menerapkan praktek LKS perlu terus diperbaharui sebab dinamika bisnis di LKS perkembangannya sangat cepat sekali. Maka dari itu peran DSN – MUI sebagai lembaga yang memayungi fatwa tersebut harus terus kreatif dalam mendesain fatwa-fatwa baru untuk perkembangan ekonomi syariah.

Sedangkan Gunawan Yasni yang merupakan salah satu anggota DSN mengungkapkan saat ini DSN terus memonitoring perkembangan bisnis LKS dan dalam memonitoring tersebut DSN terus berupaya merumuskan fatwa-fatwa baru yang bermanfaat bagi industri syariah.

"Alhamdulillah dengan peran DSN selama para pelaku bisnis syariah masih tetap memegang prinsip-prinsip syariah dan sangat sedikit menyimpang dari aturan-aturan syariah", paparnya.

Hal tersebut disampaikan oleh K.H. Ma'ruf Amin selaku Ketua Harian DSN saat mengomentari kegiatan sarasehan nasional tentang kontekstualisasi dan aktulisasi fatwa DSN-MUI yang diselenggarakan di gedung Bank Indonesia - Jakarta.

Menurutnya, saat ini ekonomi syariah di Indonesia sedang bangun tidur setelah sekian lama tidur panjang. Maka tak aneh lagi LKS yang ada selama ini lebih semarak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. "Perbankan syariah, pasar modal syariah, BMT dan asuransi syariah tumbuh berkembang dengan pesat", papar Ketua Harian DSN.

Lantas Yudo Paripurno Ketua Umum Badan Abritase Syariah Nasional (Basyarnas) mengatakan bahwa sengketa-sengketa dalam bisnis syariah tak sebanyak seperti di negara lain dan menurut penilain dia selama ini fatwa-fatwa DSN masih menjadi pegangan hukum dalam mengoperasikan LKS.

Tapi menurut Sekjen IAEI, Agustianto lembaga DSN harus di *back up* riset akademisi sehinga perkembangan fatwa-fatwa baru akan selalu muncul dan menambah daya inovasi LKS mengembangkan bisnisnya.
"Hal itu sangat perlu untuk dilakukan", katanya. •*Agus Y.*

MUI berpendapat bahwa status syubhat tidak boleh dibiarkan karena masyarakat/konsumen butuh kepastian halal atau haram yang merupakan hukum Islam. Untuk itulah, MUI mengeluarkan sertifikat halal kepada produsen agar konsumen dapat mengetahui secara pasti bahwa produk tersebut halal.

Muhamad Nadratuzzaman Hosen
President of World Halal Council

Sertifikasi Halal Kewenangan MUI ?

Harian umum Republika pada hari Jumat, 24 Juli 2009 pada halaman 12 menulis tentang pernyataan Ketua MUI, K.H. Maruf Amin bahwa MUI menolak dan menegaskan, mengambil alih sertifikasi halal dari MUI merupakan kesalahan besar. "Bila mengambil alih fatwa dari pihak yang berkompeten, maka ini kesalahan besar, kata alumni Pesantren Tebuireng ini. Menurutnya sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menjelaskan status kehalalan suatu produk. Fatwa ini harus dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi untuk menetapkan fatwa yaitu MUI".

Kenapa beliau menyatakan setegas itu, hal ini dikaitkan dengan masih digodoknya RUU Jaminan Produk Halal antara Komisi VIII DPR dengan Departemen Agama, yang sebentar lagi akan menyelesaikan RUU tersebut menjadi UU. Untuk mendudukkan persoalan ini menjadi jelas dan bermanfaat, penulis mencoba untuk membahasnya dari berbagai pendekatan dan fakta yang ada.

Awal lahirnya LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika) MUI adalah adanya kasus lemak babi yang sebagian besar masyarakat mengetahuinya. Pada waktu itu, para ulama secara demonstratif minum susu dan makan mie yang terkena isu lemak babi. Kaedah yang dipakai para ulama pada waktu itu adalah "status hukum asal dari makanan yang terkena isu tersebut adalah "halal" (misal susu dan mie), bila diduga tidak halal (ada syak) maka statusnya tetap halal sampai kemudian dapat dibuktikan terbukti tidak halal. Jika terbukti mengandung unsur haram maka status hukumnya berubah dari halal menjadi haram.

Untuk sementara masyarakat tenang, tetapi para cendekiawan muslim yang ahli food technology tidak sependapat dengan para ulama bahwa kaedah tersebut untuk diterapkan selamanya, karena terbukti bahwa makanan dan minuman yang beredar dan mendapat izin pemerintah tersebut merupakan produk olahan yang telah tersentuh dengan teknologi dan asal-usul bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan tidak dapat diketahui secara mudah oleh ilmuwan dan masyarakat awam dan kemungkinan besar mengandung bahan haram.

Atas dasar tersebut, para ulama merubah kaedah bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang berbentuk produk olahan (tidak alami) diproduksi dengan menggunakan teknologi (bukan proses alami) serta asal usul bahan tidak jelas karena sulit diketahui secara mudah maka produk olahan tersebut statusnya "syubhat". MUI berpendapat bahwa status syubhat tidak boleh dibiarkan karena masya-rakat/konsumen butuh kepastian halal atau haram yang merupakan hukum Islam. Untuk itulah, MUI mengeluarkan sertifikat halal kepada produsen agar konsumen dapat mengetahui secara pasti bahwa produk tersebut halal.

Pada saat itu, tidak ada aturan berproduksi secara halal dan tidak ada bahan baku yang dinyatakan halal atau tidak halal oleh Pemerintah. Bila aturan itu ada, pada saat itu, apakah pemerintah melakukan pengawasan dan penelitian yang mengacu kepada peraturan berproduksi secara halal. Yang jelas drh. Soehadji, Dirjen Peternakan,Deptan datang ke MUI untuk mendiskusikan bagaimana membuat aturan agar Rumah Potong Hewan (RPH) bekerja berdasarkan aturan hukum Islam. Sedangkan, Depkes (Dirjen POM) mengajak MUI bekerjasama, yang akhirnya MUI melakukan sertifikasi halal dengan melakukan audit bersama dengan BPOM, dimana auditor BPOM melakukan audit untuk pengawasan "quality and

food safety" (kualitas dan keamanan pangan) yaitu aspek thayibnya sedangkan auditor MUI aspek halalnya.

Disini kita melihat bahwa sertifikasi halal lahir karena adanya kekosongan hukum dan keadaan untuk melindungi konsumen muslim dari makanan haram dan adanya permintaan masyarakat untuk dilindungi. Jalan pintas yang dipakai adalah melakukan sertifikasi halal di tingkat produsen. Artinya sertifikat halal adalah alat untuk mengkoreksi kegiatan berproduksi yang belum ada aturannya untuk produsen agar berproduksi secara halal.

Implikasinya, bila DPR dan Pemerintah dapat membuat aturan cara berproduksi halal, memberikan izin edar kepada produsen dengan jelas mengkategorikan halal dan tidak halal, melakukan pengawasan berproduksi halal, memberikan keterangan halal atau tidak halal untuk produsen yang mengedarkan produknya dimasyarakat dan menegakkan aturan secara tegas, adil dan konsisten maka sertifikat halal sebenarnya tidak diperlukan, atau dengan kata lain sertifikasi halal menjadi tidak efektif bila ada aturan berproduksi halal, dimana produsen mengetahui bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan halal dan produsen berusaha untuk mentaatinya.

Kita harus pahami bahwa sertifikasi halal yang dilakukan MUI adalah cara masyarakat untuk mengkoreksi atau mengawasi produsen sebelum produknya beredar di masyarakat karena masyarakat tidak berwenang mengawasi produk yang beredar. Bila produsen yakin dan telah mengikuti aturan pemerintah untuk berproduksi dengan cara yang halal maka sebenarnya produsen tersebut tidak memerlukan sertifikat halal.

Dengan begitu, usaha Departemen Agama ingin menjadikan lembaga sertifikasi halal menjadi lembaga pemerintah atau badan di bawah Departemen Agama menjadi keliru, karena lembaga tersebut terlalu jauh mencampuri urusan Agama Islam dalam menentukan Hukum Halal-Haram suatu produk. Namun, Pemerintah dan DPR berhak memutuskan ketentuan kepada produsen untuk cara-cara atau sistem berproduksi secara halal.

Pada saat sekarang MUI mengeluarkan dua macam sertifikat yaitu pertama, sertifikat halal yang sudah dikenal masyarakat yaitu MUI mensertifikasi bahan, proses dan produknya halal yang kita kenal halal lizatihi, disini peranan Komisi Fatwa sangat dominan sedangkan kedua, sertifikat sistem jaminan halal yaitu perusahaan yang bersertifikat halal dengan dipandu dan dibina oleh LPPOM MUI membangun dan membuat suatu sistem agar dapat menjamin bahwa produknya tetap halal walaupun terjadi perubahan waktu, perubahan bahan baku, perubahan pemasok, perubahan harga bahan baku maupun perubahan harga jual tetap berproduksi secara halal. Sistem jaminan halal ini bisa dikatakan walaupun tidak sepenuhnya benar bahwa sistem ini merupakan kristalisasi dari sistem ISO, HACCP dan Maqasid Syariah. Dalam sistem ini tidak diperlukan fatwa oleh Komisi Fatwa tetapi semua komponen penilaian sistem jaminan halal ini telah disetujui oleh Komisi Fatwa. Sebagai tambahan, pada tanggal 28 dan 29 Juli LPPOM mengadakan Pelatihan Sistem Jaminan Halal secara International di Botani Square, Bogor.

Bila Pemerintah dan DPR ingin juga Departemen Agama melakukan sertifikasi maka yang paling mungkin adalah membuat ketentuan sistem jaminan halal, sistem penilaian jaminan halal dan sertifikat jaminan halal tanpa memerlukan fatwa ulama seperti yang telah dikembangkan oleh LPPOM MUI, yang sering disebut "Halal Assurance System". Penilaian sistem dapat dilakukan dengan cara score. Tetapi sertifikasi Halal tetap dilaksanakan oleh MUI karena MUI dengan fatwanya berwenang menentukan produk halal berdasarkan bahan baku halal yand diproses menggunakan technology.

Dari sisi konsumen muslim, adanya permintaan tentang kejelasan mana yang produk halal dan mana yang non halal, artinya konsumen menginginkan adanya "fair trade" (berdagang secara jujur dan benar). Sekarang, konsumen muslim menganggap banyak produsen yang "unfair trade". Logo MUI yang sekarang banyak ditempel di berbagai produk kemasan dari produsen yang telah mendapat sertifikat halal MUI adalah merupakan cara produsen berkomunikasi dengan konsumen bahwa kami berproduksi secara halal mengikuti aturan yang ditetapkan oleh MUI karena produsen juga ingin "fair trade". Alhamdulillah, masyarakat mempercayai logo MUI tersebut.

Jika kita melihat cara kerja BPOM dan produsen besar nasional maupun multinasional, pihak produsen berusaha memperoleh beberapa sertifikat mutu dan keamanan pangan (quality and food safety) seperti ISO, HACCP dan lain-lain. Sertifikat-sertifikat tersebut dikeluarkan oleh lembaga swasta, disini peran BPOM untuk mengawasi apakah produsen sudah bekerja sesuai dengan sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan "quality dan food safety" tersebut, apa belum?.

BPOM hanya membuat regulasi dan mengawasinya. Implikasinya, kepada produsen yang ingin menghasilkan produk halal, Departemen Agama membuat regulasi dan mengawasi produksi dengan sistem jaminan halal bukan melakukan sertifikasi halal. Maksudnya, Departemen Agama yang mengawasi produsen yang memiliki sertifikat halal dan dapat mengkomunikasikan kepada masyarakat/konsumen muslim mana produsen yang produknya halal dan mana yang tidak halal.

Dengan uraian tersebut diatas maka pernyataan Al Mukarram K.H. Maruf Amin adalah benar dan sahih bahwa serifikat halal adalah kewenangan MUI, sehingga Pemerintahan SBY sekarang dan yang akan datang tidak perlu mengurusi sertifikasi halal. Waktu, dana dan tenaga dapat dihemat dan dialokasikan kepada pengawasan produk-produk yang mengaku halal tanpa sertifikat halal dan pengembangan infrastruktur halal sehingga produsen dengan mudah berproduksi halal. Pada waktunya nanti semua produsen telah berproduksi secara halal sehingga sertifikat halal nantinya juga tidak dibutuhkan lagi. Wallahualam.

Sukuk Dana Haji Akan Diterbitkan

Selain sukuk ritel dan sukuk global yang telah diterbitkan, pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan sukuk dana haji Indonesia dengan jumlah nominal Rp. 7 triliun di tahun ini. Diterbitkannya sukuk dana haji tersebut merupakan hasil pembicaraan kedua belah pihak antara Departemen Keuangan (Depkeu) dan Departemen Agama (Depag).

Dirjen Pengelelolaan Utang Negara Departemen Keuangan, Rahmat Waluyanto di Jakarta, mengatakan—diterbitkannya sukuk dana haji untuk mengait para investor domestik. Menurutnya selama ini banyak sekali dana-dana investor domestik belum dimanfaatkan secara maksimal. "Sekaligus mengurangi ketergantungan hutang pada luar negeri", paparnya.

Sejak tahun 2008 hinga kini, kata Rahmat Waluyanto pemerintah telah menerbitkan sukuk sebesar Rp. 19,84 triliun. Terdiri dari sukuk SRI-01, Sukuk Ritel, Sukuk global dan Sukuk Dana Haji Indonesia. Dengan *underlying asset* adalah bangunan milik kementerian dan lembaga pemerintah.

Sukuk dana haji, menurut Rahmat akan banyak menyerap para investor karena dana-dana haji di Indonesia setiap tahunnya terus bertambah. Hal inilah yang mendorong Depag dan Depkeu menerbitkan sukuk tersebut. ◆*Agus Y*.

Rendahnya Mental *Attitude* Kewirausahaan Menjadi Kendala Koperasi

Koperasi tumbuh berkembang pesat di masyarakat —tapi banyak pula koperasi yang terpaksa harus gulung tikar karena tak mampu berkembang. Melihat realitas tersebut—Deputi Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Agus Muharram melihat bahwa fenomena tersebut tak lepas dari internalisasi koperasi itu sendiri.

Jika dikaji secara jauh, kata Deputi pembiayaan ada permasalahan tersendiri dalam mengembangkan koperasi.

Pertama, permasalahan mental attitude anggota dan pengurus. "Rata-rata mereka kurang memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan", ujar Deputi Pembiayaan ketika berbicara di ruang kerjanya di Kementerian Negara Koperasi dan UKM - Jakarta.

Kedua, menurutnya keinginan untuk mengembangkan leadership mereka masih kurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut koperasi harus sering melakukan pelatihan-pelatihan baik keterampilan kewirausahaan maupun manajemen kepemimpinan.

Untuk mengatasi hal tersebut—Kemennegkop UKM telah membuat berbagai program untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah yang dilakukan selama ini oleh Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan membuat program pelatihan khusus untuk meningkatkan profesionalisme pengelola koperasi konvensional maupun syariah.

"Selain itu kami juga membuat berbagai regulasi seperti pengawasan dan penilaian terhadap pengelolaan koperasi selama ini", papar Agus Muharam.

Kemudian selain itu, Agus Muharam juga menekankan agar disetiap internal koperasi sering melakukan pelatihan-pelatihan pada para anggota dan pengurus tentang bagaimana mengelola bisnis koperasi. Jangan sampai hal ini tidak diadakan sehingga yang terjadi adalah regenerasi menjadi putus serta inovasi bisnis menjadi stagnan.

"Banyak sekali koperasi syariah sukses karena menerapkan sistem tersebut dan ada pula koperasi yang tidak aktif karena inovasi tak pernah digali sama sekali", katanya. • *Agus Y.*

Pelatihan Kewirausahaan

Foto : Repro

LPPOM-MUI Serukan Pemerintah Sediakan Vaksin Halal

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), M. Nadratuzzaman Hosen, mendesak pemerintah Indonesia serius menangani kasus vaksin meningitis. Pemerintah diminta untuk segera mengganti vaksin meningitis yang telah dinyatakan haram oleh MUI.

"Pemerintah harus segera mencarikan pengganti vaksin meningitis. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama", ungkap Nadra.

Menurutnya dimungkinkan untuk mendapatkan vaksin halal. Saat ini sudah ada produsen vaksin meningitis yang mengandung bahan halal. "Menurut informasi, ada dua vaksin meningitis yang halal. Pertama yang diproduksi Amerika, kedua diproduksi Cina di Xianjiang", ungkapnya.

Pihak LPPOM-MUI, menurut Nadratuzzaman sudah mengirimkan surat melalui *e-mail* dan faksimile kepada kedua produsen vaksin tersebut. Produsen dari Cina sudah meresponnya dan akan memberikan samplenya beserta bahan-bahannya untuk diteliti. Sementara dari produsen Amerika masih belum merespon hingga sekarang.

Jika pemerintah mengizinkan, Nadratuzzaman mengatakan, tim dari LPPOM MUI akan berangkat ke Cina untuk menelitinya. Jika terbukti halal, kata Nadra fatwa MUI terkait vaksin tersebut gugur. Sehingga fatwa dharurat tidak bisa dijadikan hujjah untuk penggunaan vaksin meningitis yang mengandung enzim babi yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah Arab Saudi.

Diharapkan masyarakat perlu memahami secara jelas terkait dengan fatwa vaksin meningitis yang telah dikeluarkan MUI. Nadratuzzaman meminta masyarakat harus mengerti fatwa MUI yang baru dikeluarkan tersebut. Sebab, bagi yang sudah menunaikan ibadah haji, vaksin tersebut menjadi tidak dharurat lagi, artinya vaksin tersebut tetap haram hukumnya. "Sebaiknya, bagi yang sudah pernah melakukan ibadah haji memberi kesempatan kepada yang belum menunaikan ibadah haji", katanya. ♦ *roel*

Penyerahan kewenangan sertifikasi halal dalam rapat pembahasan Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) masih belum mencapai final. Hingga sekarang penunjukkan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal masih belum jelas. Apakah diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) ataukah kepada Departemen Agama.

"Untuk lembaga dan kewenangannya masih kami pending. Sampai sekarang masih belum kami putuskan siapa yang lebih berwenang", ungkap A Hakam Naja, wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI, setelah membuka acara pelatihan international tentang sistem jaminan halal (SJH) di Botani Square, Bogor.

Dalam penjelasannya Hakam mengatakan bahwa sekarang masih dalam proses *hearing*. Dimana seluruh lembaga terkait dan masyarakat sebagai konsumen dilibatkan untuk memberikan penjelasan kepada DPR RI. Hal ini dimaksudkan, kata Hakam, agar DPR dapat menempatkan dan memutuskan secara proporsional.

"Kami tidak menafikkan seluruh upaya yang telah dilakukan oleh MUI. Bahwa MUI telah merintis sertifikasi halal ini sejak 20 tahun yang lalu tetap kami perhatikan", jelasnya. "Dan ini tidak begitu saja bisa diambil alih", tambahnya.

Menurut Hakam, Pembahasan yang dilakukan DPR akan melihat secara komprehansif. Posisi DPR yang berada ditengah-tengah berupaya untuk memutuskan yang terbaik, sehingga dapat memberikan yang lebih adil. "sebagai pihak yang berada ditengah akan mencoba memadukan supaya bisa lebih adil," ujarnya.• *roel*

DPR Belum Putuskan *Kewenangan* Sertifikasi Halal

LPPOM MUI Latih Lembaga Sertifikat Halal Dunia

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) melatih auditor lembaga sertifikasi halal dunia terkait dengan system jaminan halal. Bertempat di Kota Bogor LPPOM-MUI melatih para auditor dunia terkait dengan sertifikasi yang memenuhi standar terbaik dalam jaminan halal.

Foto : Repro

Program pelatihan dengan skala international ini diikuti oleh 46 peserta dari Negara-negara lain yaitu diantaranya China, Amerika, Thailand, Brasil, Filipina, Belanda, dan 38 peserta dari dalam negeri. Peserta pelatihan merupakan auditor halal untuk lembaga sertifikasi dan para internal auditor perusahaan produk halal.

Rencananya pelatihan ini akan berlangsung selama tiga hari dengan materi yang mencakup proses sertifikasi terkait dengan standar sertifikasi halal pada masing-masing model produk hingga bagaimana memberikan system jaminan halal yang menyeluruh dari proses awal pembuatan produk sampai akhir pembuatan hingga dalam hal manajemen yang mendukung proses sertifikasi tersebut.

Dalam sambutannya pada *international workshop and training on halal assurance system* ini Walikota Bogor, Diani Budiarto, mengatakan bahwa terkait dengan halal dibutuhkan persepsi dan pemahaman yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait, baik pemerintah maupun umum.

Lebih lanjut Walikota Bogor menjelaskan kepada kantor berita ekonomi syariah bahwa pada prinsipnya, Pemerintah Kota Bogor sangat mendukung seluruh kegiatan yang memberikan jaminan kehalalan dalam suatu produk. Hal ini untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi seluruh produk. "Penduduk Bogor 90% muslim, sehingga halal ini menjadi sangat penting untuk pemerintah Kota Bogor", tegasnya.

Direktur Eksekutif LPPOM-MUI, M. Nadratuzzaman Hosen, mengatakan bahwa pelatihan ini sifatnya internasional dengan peserta dari berbagai Negara dibelahan dunia. Dengan banyaknya peserta dari negara-negara lain, hal ini menunjukkan bahwa system auditing dan sertifikasi halal LPPOM-MUI telah diakui secara internasional. "Lembaga-lembaga sertifikasi di Negara lain mengakui sistem seritifikasi halal yang diterapkan LPPOM-MUI, sehingga mereka mau belajar dengan kita. Dan sistem jaminan halal yang telah diterapkan LPPOM-MUI menjadi standar internasional dalam menjamin kehalalan suatu produk", tegasnya. • *roel*

BWI Letakkan **Batu Pertama RSIA**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memulai rencana pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Serang, Banten. Dengan memanfaatkan asset wakaf tanah dari keluarga KH. Achmad Wardi akan dibangun RSIA dengan kapasitas 50 kamar rawat inap dan 8 poliklinik.Secara simbolis peletakkan batu pertama telah dilakukan pada tanggal 23 Juli 2009 oleh Ketua Umum BWI, KH. Tholhah Hasan, dilanjutkan oleh Dirjen Bimas Islam Depag mewakili Menteri Agama, Nasarudin Umar, Staf Ahli Gubernur Banten mewakili Gubernur Banten, Sartono, Ditjen Bina Medik mewakili Menteri Kesehatan, T. Marwan Nusri, serta dari perwakilan keluarga wakif oleh Ifah Fatimah.

Dirjen Bimas Islam Depag, Nasarudin Umar dalam sambutannya mengatakan bahwa pembangunan RSIA merupakan program monumental BWI yang menjadi simbol gerakan wakaf produktif di Indonesia. Dan program ini akan menjadi pilot project pengembangan wakaf oleh BWI yang akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Nasarudin Umar merasa sangat optimis bahwa RSIA akan berhasil dalam pengelolaannya. Mengingat pengembangan RSIA telah didukung oleh semangat dan komitmen para pengelola (BWI) serta dukungan dari lembaga lain seperti Perbankan Syariah dan masyarakat secara umum.

"Tidak mungkin tidak sukses. Karena ini akan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah", ungkapnya. "Kita tahu Gubernurnya saja seorang Ibu, Menkesnya juga seorang Ibu, masa tidak mendukung", kelakarnya.

Pembangunan RSIA ini menempati tanah seluas 2.348 m2 dengan rencana luas bangunan 1.974 m2. Fasilitas RSIA akan dilengkapi dengan 8 poliklinik dan rawat inap dengan kapasitas 50 tempat tidur terdiri dari ruang perawatan kelas I, kelas II dan kelas III. Pelayanan lainnya antara lain ruang observasi, ruang operasi, pelayanan penunjang 24 jam termasuk farmasi, laboratorium dan radiologi.

RSIA BWI rencananya juga akan menyediakan peralatan medis yang lengkap dan canggih seperti CT scan, USG, X-Ray dan lain-lain. Serta akan menyediakan layanan publik mencakup bank, health shop, food court, dan mini market. Bangunan ini akan menempati di atas tanah seluas 1000 m2 milik wakif terletak di depan RSIA.

Pembangunan RSIA ini akan menelan biaya pembangunan sebesar Rp 11 milyar, dengan rincian biaya untuk pembangunan gedung sebesar Rp 7 milyar dan untuk peralatan sebesar Rp 4 milyar. Ditargetkan untuk pengembalian investasi mencapai break event point (BEP) selam 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Untuk mensuksekan proyek pembangunan RSIA ini BWI telah menggandeng lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai LKS penerima wakaf uang yang terdiri dari 5 (lima) bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank DKI syariah. ◆ *roel*
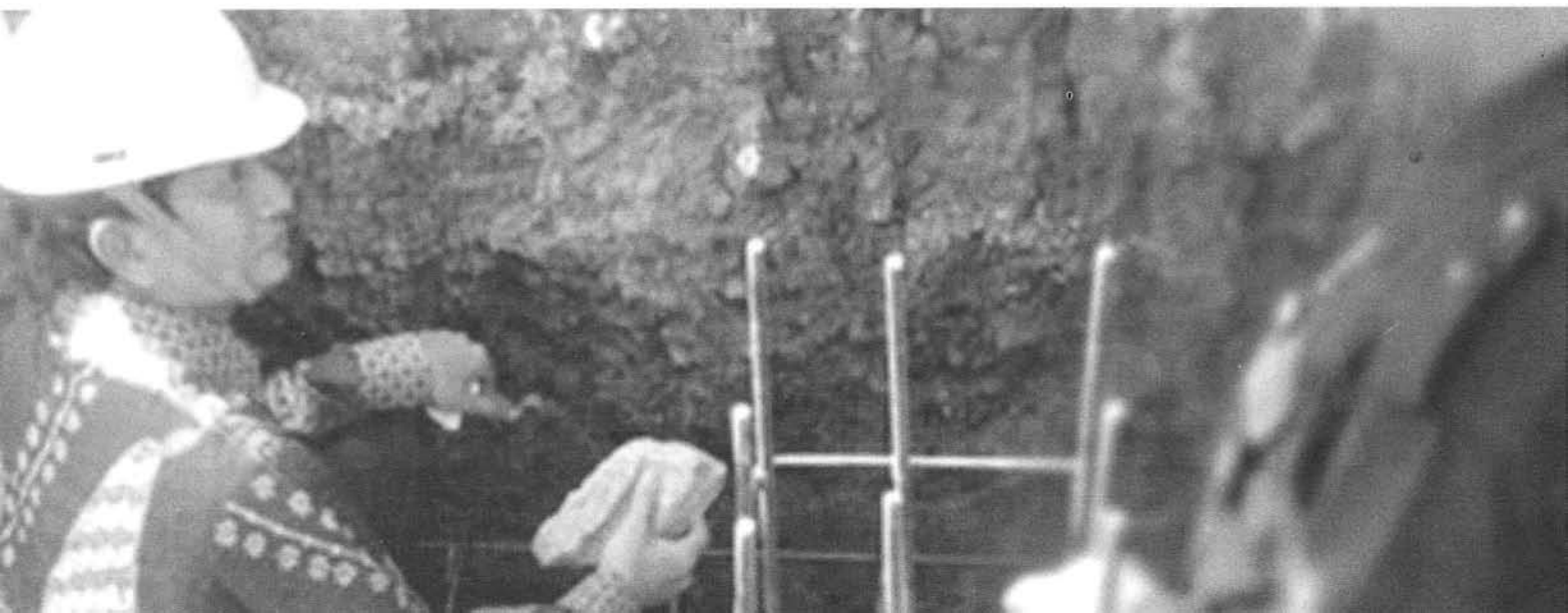
BNI Syariah *Siap Dukung* Badan Wakaf Indonesia

Untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia BNI Syariah siap untuk mendukung gerakan wakaf produktif yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Memanfaatkan jaringan dan nasabahnya BNI Syariah akan mensosialisasikan dan mengumpulkan harta wakaf dari masyarakat.

Hal ini disampaikan Direktur Unit Usaha Syariah BNI Ismi Kushartanto ditengah-tengah acara peletakan batu pertama Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Serang, Banten, 23/07/09. Menurutnya peran BNI Syariah akan lebih banyak pada pengelolaan harta wakaf tersebut sebagai penghimpun dana wakaf dari masyarakat.

Menurut Ismi BNI Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah (LKS) yang ditunjuk sebagai LKS penerima wakaf uang. Sehingga akan menjalankan peran dan fungsinya sesuai yang ditetapkan. Disamping BNI Syariah akan membantu untuk memperkenalkan wakaf uang kepada masyarakat luas.

BNI Syariah saat ini sedang mempersiapkan seluruh infrastruktur yang akan mendukung untuk pengembangan wakaf uang ini. Pada prinsipnya, kata Ismi, BNI Syariah akan memberikan kemudahan kepada wakif untuk melakukan pembayaran wakaf uang tersebut. Sehingga masyarakat tidak akan kesulitan lagi untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diwakafkan.

Wakaf uang, menurut Ismi memiliki dimensi yang cukup luas untuk dijadikan produktif. Banyak sektor-sektor produktif yang dapat dikembangkan dengan wakaf uang ini. Dengan menggandeng bank syariah yang bergerak dalam bidang bisnis harta wakaf tersebut akan dapat berkembang secara optimal. Sehingga, wakaf akan lebih cepat tumbuh dan berkembang dan akan tercapai sesuai dengan tujuannya. ♦*roel*

Wakaf Akan Jadi
Soko Guru Perekonomian Umat

Besarnya potensi wakaf di Indonesia akan mendukung perkembangan wakaf untuk dikelola secara produktif. Wakaf akan menjadi soko guru perekonomian umat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mampu akan terbantu dengan pengelolaan wakaf secara produktif.

"Saya optimis wakaf yang akan datang akan menjadi soko guru perekonomian umat, wakaf juga akan membiayai kebutuhan umat. Insya Allah kedepan tingkat kesejahteraan perekonomian umat akan lebih baik", demikian tegas Nasarudin Umar Dirjen Bimas Islam Departemen Agama kepada kantor berita ekonomi syariah.

Menurut Pak Nasar, demikian biasa disapa, perkembangan wakaf akan lebih progresif, karena daya dukungnya sangat kuat. Wakaf memiliki cakupan yang lebih luas, dan dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lebih luas. Di luar negeri pun seperti itu bahwa wakaf cakupannya lebih luas. Sementara kalau zakat pengembangannya cukup terbatas, karena hanya diperuntukkan pada ashnaf yang harus jelas, serta ukuran kuantitatifnya juga harus jelas.

"Wakaf tidak terbatas pada ukuran minimal dan maksimalnya, begitupun peruntukkannya wakaf tidak terbatasi", ungkap Nasar.

Wakaf ke depan menurut Nasar akan jauh lebih populer. Tidak hanya populer tapi wakaf akan jauh lebih realistis untuk memberikan bantuan kesejahteraan umat dibanding institusi-institusi lain.

Selama ini masyarakat lebih banyak memperhatikan zakat di banding wakaf. Padahal kata Nasar pada zaman Nabi SAW dan pada masa sahabat, meskipun zakat rukun Islam, tapi yang lebih populer saat itu adalah istilah shadaqah, wakaf diantaranya.

"Alangkah kikirnya kalau umat Islam yang dikeluarkan hanya zakat, itu pengeluaran minimal", pungkasnya. • *roel*

BANK SYARIAH

BANK MUAMALAT
Kantor Pusat, Gedung Arthaloka
Jl. Jenderal Sudriman Kav. 2 Jakarta
Telp. :021-2511616,2511414
Hotline: 0807168262528 (pulsa lokal)

JAWA
Bekasi
Ruko Duta Permai Plaza Blok B II No. 21-22
Bekasi 17145
Telp. : 021-8840867, 8867641, Fax. 021-8843345

Bandung
Jl. Buah Batu No. 276 A, Bandung 40265
Telp. : 022-7305919, 7308246 7309229,7309339
Fax. :022-7309393,7331560

Bogor
Jl. Raya Pajajaran, Bogor
Telp. : 0251-350941 Fax. 0251-353366

Cirebon
Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 7 Cirebon
Telp. : 0231-205933, 244249, Fax. :0231-206817

Cianjur
Jl. Siti Jenab No. 39 Cianjur
Telp. : 0263-280951, Fax. 0263-280451

Tasikmalaya
Jl. Ahmad Yani No. 15-17, Tasikmalaya
Telp. : 0265-324900, 326900 Fax. : 0265-310234

Jakarta
Jl. RS. Fatmawati No. 15 C-D Jakarta 12420
Telp.: 021-7662479-82 Fax. 021-7509723

Semarang
Jl. Soegijopranoto No. 102 Semarang 50141
Telp. : 024-3564134, 3564135-9 Fax. 024-3565377

Pekalongan
Jl. Hayam Wuruk No. 9 Pekalongan
Telp. : 0285-426888 Fax. 0285-425588

Yogyakarta
Jl. Kapten Piere Tendean No. 56 RT 052 / RW 011
Kel. Wirobrajan Kec. Wirobrajan Yogyakarta
Telp. : 0274-414666 Fax. : 0274-414222

Solo
Jl. Kapten Mulyadi No. 87 F Ruko Lojiwetan,
Kedunglumbu, Pasar Kliwon Surakarta
Telp. : 0271-668857,668867 Fax. 0271-663936

Purwokerto
Komp.Ruko Perintis Kemerdekaan Kios No. 36,
Kel. Purwokerto Selatan, Banyumas
Telp. : 0281-642345 Fax. 0281-642346A

Surabaya
Jl. Raya Darmo No. 81 Surabaya 60265
Telp. : 031-5611230 Fax. :031-5677861

Malang
Jl. Kawi Atas No. 36 A Malang
Telp. : 0341-556020-21 Fax. 0341-556019

Jember
Jl. Kartini No. 8 Jember
Telp. : 0331-410431-3 Fax. : 0331-410432

Kediri
Jl. Hasanudin No. 26
RT 03 RW 05 Kel. Dandangan, Kec. Kota Kediri
Telp. : 0354-671801 Fax. :0354-671800

Tangerang
Ruko BSD Plaza
Jl. Raya Serpong Sektor IV
Kav. D7 Serpong, Tangerang 15310
Telp. : 021-5371036, Fax. :021-537103

SUMATERA
Banda Aceh
Jl. Sri Ratu Safiatuddin No. 3, Kel. Peunayong,
Kec. Kota Alam Kotamadya Banda Aceh
Telp. : 0651-24333 Fax, 0651-638549

Medan
Jl. Gajah Mada No. 21 Medan
Telp. : 061-4535353, Fax. 061-4535252

Sidimpuan
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 8
Padang Sidimpuan
Telp. : 0634-22999 Fax. : 0634-27837

Tanjung Balai
Jl. Let.Jend. Jamin Ginting Km. 1
Desa Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota
Tanjung Balai
Telp. : 0623-595444 Fax. 0623-596444

Batam
Jl. Yos Sudarso, Komplek Ruko Balai Point
Blok B-1 No. I, Batam
Telp. : 0778-431201-4 Fax. : 0778-431205

Bengkulu
Jl. S. Parman No. 62 D, Padang Jati Bengkulu
Telp. : 0736-348100, 348111 Fax. 0736-345999

Jambi
Jl. Sultan Agung No. 14-15
Desa Pasar Jambi, Jambi 36112
Telp.: 0741-51241-43, Fax. : 0741-51151

Padang
Jl. Rasuna Said No. 107 Kel. Rimbo Kaluang
Kec. Padang Barat, Padang
Telp.: 0751-54106, 55764 Fax.: 0751-446927

Palembang
Jl. Jendral Sudirman Km. 5,
Kel. 20 Ilir I, Kec. Ilir Timur I Palembang
Telp.:0711-421545-4, 412328 Fax. : 0711-412225

Lampung
Jl. Raden Intan No. 92 D
Pelita Tanjungkarang Pusat,
Bandar Lampung
Telp. : 0721-242123 Fax. : 0721-242275

KALIMANTAN
Pontianak
Jl. Sultan Abdurrahman No. 62 A
Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Sel.
Pontianak
Telp.: 0561-731756,738604 Fax. : 0561-731375

Banjarmasin
Jl. A. Yani Km. 6 Kel. Pemurus Luar
Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin
Telp. : 0511-264050 Fax. 0511-264049

Palangkaraya
Jl. Diponegoro No. 23 Kel. Langkai
Kec. Pahandut, Palangkaraya
Telp.: 0536-27092, 27462 Fax. : 0536-27218

Balikpapan
Jl. Jendral Sudirman
Komp. Klandasan Permai Bl. A No. b-7,
Balikpapan 76112
Telp. : 0542-731881, Fax. 0542-424643

Samarinda
Jl. K.H. Abul Hasan No. 12 A Samarinda 75111
Telp. : 0541-735697 Fax. : 0541-735674

Pekanbaru
Jl. Jend. Sudirman No. 50-52 Riau 28152
Telp. : 0761-25290, 25335, 26120, Fax. : 0761-38612

BALI
Denpasar
Jl. Pangeran Diponegoro No. 238F Sanglah,
Denpasar, Bali
Telp. : 0361-247247, Fax. : 0361-235428

NTB
Mataram
Jl. Langko No. 28, Kel. Dasan Agung,
Kec. Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp. : 0370-646060, Fax. : 0370-647272

PAPUA
Sorong
Ruko Haji Lasedi No. 4
Pasar Bersama, Jl. Jend. Sudirman RT 01/06,
Kelurahan Malawei Kota Sarong 98415
Telp. : 0951-332777 Fax. :0951-331666

SULAWESI
Makassar
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 72 Makassar 90122
Telp. : 0411-832777 Fax. 0411-832666

Palu
Jl. Tanjung Karang No. 2
Komp. Ruko Monginsidi No. 1
Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan
Kota Palu 94216
Telp. : 0451-457555, Fax. : 0451-457666

Kendari
Jl. Sam Ratulangi, Kel. Mandonga
Kec. Mandonga, Kotamadya Kendari
Telp. : 0401-329900 Fax. : 0401-329456

Gorontalo
Jl. Raja Eyato No. 35 A Kelurahan Batu
Kecamatan Kota Selatan Gorontalo
Telp.: 0435-831747 Fax. : 0435-830260

Manado
Jl. Rumambi No. 5 B Komp Pelabuhan Manado
Kel. Wenang Utara, Kec. Wenang Manado 95111
Telp.: 0431-877778, 878504 Fax. 0431-877779

"Sesungguhnya yang halal sudah jelas,
yang harampun demikian.
Antara keduanya ada hal-hal yang samar,
yang tidak diketahui banyak orang,
maka siapa yang menghindari yang samar
maka dia telah menyucikan diri
menyangkut agama dan kehormatannya"

(HR. Bukhari dan Muslim)

Leli Nirmalasari

Meskipun kewajiban shaum tidak diwajibkan bagi anak-anak (orang yang belum baligh), namun tidak ada salahnya kita mulai memperkenalkan dan membiasakan shaum pada anak-anak kita, sehingga ketika anak-anak kita telah baliqh sudah terbiasa (familiar) dengan kewajiban ini.

Berlatih Shaum Bagi Anak

Tidak terasa bulan Ramadhan akan segera tiba, bulan yang penuh berkah dan selalu dinantikan seluruh umat Islam. Didalam bulan yang penuh Rahmat Allah SWT ini, kita diwajibkan untuk shaum selama 1 bulan penuh.

Kewajiban shaum ini bertujuan untuk lebih meningkatkan ketaqwaan kita, sebagaiman firman Allah SWT :
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa".

Hikmah yang bisa kita dapat dalam melaksanakan shaum adalah sebagai berikut:

1. Mendidik jiwa untuk bermuraqabatullah (merasa senantiasa diawasi Allah)
2. Mendidik keinginan (menahan hawa nafsu)
3. berpuasa sangat bermanfaat bagi pencernaan, mengeluarkan racun-racun dari tubuh, mengendalikan stress dan sebagai terapi untuk beberapa penyakit tertentu misalnya: hipertensi, kanker kardiovaskular, ginjal dan depresi
4. Dalam bulan Ramadhan biasanya kita banyak melakukan kegiatan social dan muamalah yang baik dengan sesama.

Meskipun kewajiban shaum tidak diwajibkan bagi anak-anak (orang yang belum baligh), namun tidak ada salahnya kita mulai memperkenalkan dan membiasakan shaum pada anak-anak kita, sehingga ketika anak-anak kita telah baliqh sudah terbiasa (familiar) dengan kewajiban ini.

Dalam memperkenalkan dan membiasakan shaum, ada beberapa kiat (upaya) yang bisa kita lakukan, diantaranya:

1. Sebagai langkah awal berikan dulu pengertian tentang kewajiban shaum, mengapa kita shaum, apa manfaatnya, apa yang kita dapat dengan melaksanakan shaum dan lain-lain.
2. Mulailah dengan sahur (apabila ananda masih belum bisa sahur pada waktu shubuh/waktu sahur sesungguhnya) biarkan ananda sahur pada jam 6 wib atau 6.30 wib, berikan

Foto : Repro

menu makanan atau minuman yang banyak mengandung serat supaya tidak cepat lapar dan vitamin (jika diperlukan).

3. Bila ananda mengeluh lapar dan haus karena belum terbiasa dengan shaum, berikan ananda ijin berbuka sesuai dengan kemampuan ananda, namun sebaiknya tidak memberikan makanan yang berat pada saat berbuka (misalnya nasi dll) tapi berikanlah susu atau minuman energi (susu dan sereal/biskuit) atau teh manis, karena sesungguhnya anak-anak kuat menahan lapar tapi tidak kuat menahan haus
4. Setelah ananda berbuka disiang hari, maka ananda dapat melanjutkan kembali shaumnya hingga ananda kuat.
5. Jangan pernah memaksakan untuk berbuka di saat maghrib seperti orang dewasa, biarkan ananda berbuka secara bertahap (misalnya: hari ke 1 jam 10 wib, hari ke 4 jam 11 wib, hari ke 7 pada jam 12 dan seterusnya, sampai ananda mau berbuka pada saat maghrib karena keinginan sendiri dan tubuhnya kuat), seiring dengan proses adaptasi dan pembiasaan, insya Allah ananda dapat berbuka di waktu maghrib tanpa paksaan.
6. Alihkan perhatian anak dari rasa lapar dan haus dengan bercerita, bermain puzzle, membaca dan kegiatan lain yang menarik.
7. Berikan selalu motivasi pada ananda untuk melakukan ibadah dengan baik dari hari ke hari.

Semoga tindakan kita dalam memperkenalkan dan membiasakan kewajiban ini, adalah salah satu jalan dalam membentuk anak menjadi anak yang sholeh dan sholehah, amin. •

Halal & Ekonomi Syariah

Asuhan :
Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen, MS, MEc, Ph.D

Mie Impor *Dari Negeri Cina*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Belakangan ini, banyak ditemukan di pasaran produk mie, khususnya dari Cina. Tapi, mie tersebut belum bersertifikat halal MUI. Sebagai konsumen muslim, bagaimana menyikapi hal tersebut ? Apa sebabnya produsen suatu produk tertentu *enggan* mengurus sertifikat halal ke MUI? Mohon dijelaskan bagaimana proses pengurusan untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ibu Lestari
Pejuang Jaya-Bekasi

Foto : Repro

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Terima kasih atas pertanyaan yang anda ajukan, mengenai makin maraknya produk mie yang diimpor dari luar negeri, kita memang harus berhati-hati, terutama jika belum bersertifikasi halal. Apalagi jika kita tidak tahu, dari bahan apa makanan tersebut dibuat. Oleh sebab itu, bila sesuatu yang akan kita konsumsi tidak jelas status kehalalannya, sebaiknya ditinggalkan karena sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam beragama. Mengenai produsen makanan tertentu yang enggan mengurus sertifikat halal, mungkin hal ini disebabkan faktor konsumennya sendiri yang belum terlalu peduli dengan masalah halal, sehingga tanpa sertifikat halal pun produk mereka dapat tetap dijual dan laku. Padahal, mereka tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Di sini mungkin diperlukan semacam kepedulian dari kita masing-masing untuk memperhatikan masalah halal-haram dalam soal makanan yang kita konsumsi. Mengenai proses permohonan serifikat halal, hal itu sebenarnya sangat mudah. Pertama, mengisi formulir pendaftaran yang disertai dengan dokumen pendukung dari produk yang didaftarkan. Setelah itu, kami akan melaksanakan audit di tempat produksi pemeriksaan ke pabrik, restoran, dan lain-lain, Kemudian dilakukan analisis laboratorium untuk mengetahui secara lebih pasti kandungan bahan pokok dari produk tersebut. Selanjutnya, hasil tes audit dan laboratorium tersebut dibahas dalam rapat auditor dan jika rapat tersebut tidak ada lagi pertanyaan, akan diteruskan ke rapat komisi fatwa MUI untuk menentukan kehalalan produk tersebut. Setelah komisi fatwa MUI menentukan produk tersebut halal, serifikat halalnya dapat dikeluarkan LPPOM MUI. Demikian, semoga dapat memberikan solusi bagi pertanyaan anda.

Wassalam

Salam Halal !

MENERIMA MAHASISWA BARU

SEKOLAH TINGGI BISNIS PERTAMA di INDONESIA

Program S1, D3 & D1

MANAJEMEN & AKUNTANSI

Terakreditasi "B" oleh BAN PT

KELAS:

- Reguler (pagi)
- Karyawan (malam)
- Weekend (sabtu-minggu)
- Shift

1. Menerima Mahasiswa pindahan dari berbagai jurusan
2. Tersedia pilihan jalur skripsi atau non skripsi
3. Menerima lulusan program paket "C".

Pendaftaran : s/d 30 Sept '09

Kuliah Cepat, Kualitas Hebat

Bagi Pendaftar yg membawa iklan ini dapat ditukar dgn Flashdisk

DIJAMIN TIDAK ADA BIAYA LAIN

Layanan Kiriman Brosur GRATIS, ketik : <nama>_<alamat_lengkap>, sms ke : 022-71294827

STEMBI - BANDUNG BUSINESS SCHOOL

Jl. Buah Batu 26/Jl. Gurame 21 Bandung

Telp. 022-7307722, 73010109 Fax. 022-7309947